

**STRATEGI LEMBAGA *CONSERVATION INTERNATIONAL*
DALAM KONSERVASI LINGKUNGAN DI PAPUA BARAT
TAHUN 2017-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

IKA NUR RAHMAN DINI

I92219069

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2023**

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

nama : Ika Nur Rahman Dini

NIM : 192219069

program studi : Hubungan Internasional

judul skripsi : **Strategi Lembaga Conservation International dalam Konservasi Lingkungan di Papua Barat Tahun 2017-2022**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun;
2. skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain;
3. apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya,

Yang Menyatakan



Ika Nur Rahman Dini

192219069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

nama : Ika Nur Rahman Dini

NIM : I92219069

program studi : Hubungan Internasional

yang berjudul "**Strategi Lembaga *Conservation International* dalam Konservasi Lingkungan di Papua Barat Tahun 2017-2022**", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 16 Juni 2023

Pembimbing



Dr. Zudan Rosyidi, S.S., M.A.

NIP 198103232009121004

PENGESAHAN

Skripsi oleh Ika Nur Rahman Dini dengan judul: “Strategi Lembaga *Conservation International* dalam Konservasi Lingkungan di Papua Barat Tahun 2017-2022”, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 7 Juli 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. Zudan Rosyidi, S.S., M.A.
NIP 198103232009121004

Penguji II



Moh. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198401052011011008

Penguji III



Zaky Ismai, M.S.I
NIP 198212302011011007

Penguji IV



Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si.
NIP 196811291996031003

Surabaya, 16 Juli 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan




Abd. Chalik, M.Ag.
206272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

nama : Ika Nur Rahman Dini
NIM : 192219069
fakultas/jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
e-mail address : i92219069@student.uinsby.ac.id

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Strategi Lembaga *Conservation International* dalam Konservasi Lingkungan

Di Papua Barat Tahun 2017-2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2023

Penulis



(Ika Nur Rahman Dini)

ABSTRAK

Ika Nur Rahman Dini, 2023, *Strategi Lembaga Conservation International dalam Konservasi Lingkungan di Papua Barat Tahun 2017-2022*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan praktik perikanan yang merusak menjadi aktivitas yang mengganggu keseimbangan ekosistem, seperti terjadinya *illegal fishing*, di mana ada banyak penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi lembaga *Conservation International* dalam konservasi lingkungan di Papua Barat pada tahun 2017-2022. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan penemuan penelitian, hasil menunjukkan bahwa *Conservation International* menggunakan strategi *integrate*, strategi *retain options*, strategi *mix cure and prevention*, dan strategi *focus on causes as well as symptoms* dalam konservasi lingkungan di Papua Barat tahun 2017-2022.

Kata Kunci: konservasi lingkungan, organisasi internasional non-pemerintah, Papua Barat.

ABSTRACT

Ika Nur Rahman Dini, 2023, *(The Strategy of the Conservation International for Environmental Conservation in West Papua in 2017-2022.) Undergraduate Thesis Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.*

Excessive use of natural resources and destructive fishing practices are activities that disturb the balance of the ecosystem. This study aims to discover the strategy of the Conservation International for environmental conservation in West Papua in 2017-2022. The researcher uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and literature studies. Based on the research findings, the results show that Conservation International uses an integrate strategy, retain options strategy, mix cure and prevention strategy, and focus on causes as well as symptoms strategy to conserve the environment in West Papua in 2017-2022.

Keywords: *environmental conservation, international non-governmental organization, West Papua.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Argumentasi Utama	24
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II: KERANGKA KONSEPTUAL.....	27
A. Strategi	27
B. <i>Conservation International</i>	31
C. <i>International Non-Governmental Organization</i>	34
D. Konservasi Lingkungan	38
E. <i>Common Property Resource</i>	44
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis (<i>Level of Analysis</i>)	47
D. Tahap-Tahap Penelitian	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	52
BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	54
A. Sejarah Conservation International di Papua Barat	54
1. Program <i>Terrestrial</i> di Hutan Mamberamo	57
2. <i>Marine Rapid Assessment Program</i>	59
B. Strategi <i>Conservation International</i> dalam Konservasi Lingkungan di Papua Barat Tahun 2017-2022.....	62
1. Strategi <i>Integrate</i> melalui Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Konservasi.....	63
a. Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat	64
b. Pembangunan Ekonomi Kawasan Konservasi melalui Sektor Pariwisata	68
2. Strategi <i>Retain Options</i> melalui Kerja Sama Antara <i>Conservation International</i> dan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	74
3. Strategi <i>Mix Cure and Prevention</i> melalui Partisipasi Masyarakat Lokal	76
4. Strategi <i>Focus on Causes as well as Symptoms</i> melalui Kegiatan Pemantauan Kesehatan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Distrik Buruway	80
BAB V: PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	xxxii

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, peneliti menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, argumentasi utama, dan sistematika pembahasan.

A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim (*climate change*) merupakan salah satu isu yang sudah lama diperbincangkan dalam dunia internasional sejak tahun 1800-an.² Permasalahan ini sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, minyak, dan gas) yang menghasilkan emisi karbon dioksida dari proses produksi tenaga listrik, manufaktur dan industri barang, produksi makanan, dan juga dari aktivitas penebangan hutan yang dilakukan secara liar dan berlebihan. Aktivitas-aktivitas tersebut jika dilakukan terus menerus dapat menimbulkan berbagai dampak seperti perubahan iklim, polusi, hilangnya habitat alami, hingga efek domino yang dapat berdampak besar pada seluruh ekosistem.

Kondisi ini kemudian memunculkan kesadaran bahwa permasalahan lingkungan seyogianya harus diatasi secara kolektif. Bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga aktor bukan pemerintah seperti *Non-Governmental Organizations* (NGOs) yang bergerak

² “*What Is Climate Change?*” *United Nations*, diakses 9 Januari 2023, <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>.

di bidang lingkungan hidup juga memainkan peran penting dalam menentukan langkah ke depan supaya kelestarian lingkungan di bumi ini dapat selalu terjaga.

United Nations Environment Programme (UNEP), yang merupakan salah satu organisasi utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang lingkungan hidup, dalam mengatasi permasalahan lingkungan mengajak seluruh lapisan masyarakat agar memiliki akses terhadap pengetahuan dan data-data tentang keadaan lingkungan di seluruh dunia. UNEP juga memberikan dukungan kepada anak-anak muda agar dapat mengembangkan solusi yang inovatif dalam mengelola lingkungan. Dalam kegiatannya ini, UNEP memanfaatkan pendanaan publik serta kerja sama dengan berbagai mitra untuk mempromosikan pendekatan terpadu untuk pengelolaan lingkungan.³

Begitu juga dengan NGO yang kerap kali memberikan kontribusi signifikan dalam kerja sama dan negosiasi dengan berbagai kalangan, salah satunya bersama dengan aktor-aktor negara. Pada proses negosiasi internasional, NGO berupaya untuk mempengaruhi pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh aktor negara dan organisasi internasional pemerintahan atau *International Governmental Organization* (IGO). Interaksi yang dibangun ini kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan tata kelola lingkungan guna mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang telah terjadi. Di samping itu, NGO juga terlibat dalam kegiatan advokasi dan

³ "What We Do," *UN Environment Programme*, diakses 13 Februari 2022, <https://www.unep.org/explore-topics/ecosystems-and-biodiversity/what-we-do>.

konservasi. Melalui NGO, masyarakat mempunyai wadah untuk melakukan pembelaan dan memperjuangkan isu-isu lingkungan yang bagi mereka adalah isu penting.⁴ Sementara keberadaan NGO pada kegiatan konservasi sendiri mempunyai peranan yang besar dalam mengelola ekosistem yang berada di area konservasi yang ditanganinya, baik yang berada di wilayah daratan maupun lautan.

Di Indonesia sendiri, banyak NGO asing atau *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang kini semakin menunjukkan komitmennya dalam upaya konservasi. Salah satunya adalah INGO yang berasal dari Amerika Serikat (AS), yaitu *Conservation International* (CI). CI sudah ada di Indonesia sejak tahun 1991. Keberadaan CI di Indonesia pada awalnya didasarkan pada kekhawatiran mengenai degradasi alam yang semakin banyak terjadi di tengah-tengah keanekaragaman sumber daya hayati yang ada. Sebagai INGO yang bergerak di bidang konservasi, CI melihat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia sangat penting untuk dilestarikan sebelum hilang. Hal inilah yang mendorong CI untuk membuka 4 (empat) kantor cabang di Indonesia, di antaranya ialah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali dan Papua Barat.

Provinsi Papua Barat menjadi salah satu fokus CI dalam melakukan konservasi. Hal ini dikarenakan Papua Barat sejatinya memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) hayati yang begitu beragam. Lautan di Papua Barat terindikasi memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di kawasan

⁴ Moh. Arief Rakhman & Haryadi, "Dinamika Peran NGO Lingkungan Hidup dalam Arena Politik Lokal di Provinsi Jambi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4*. No. 4 (November 2020): 188.

Bird's Head Seascape atau Bentang Laut Kepala Burung (BLKB). Wilayah tersebut termasuk dalam kawasan *coral triangle*. *Coral triangle* sendiri adalah wilayah segitiga terumbu karang yang memiliki presentase 75 % dari seluruh terumbu karang yang ada di dunia, di mana di wilayah tersebut ditemukan lebih dari 500 spesies karang. Dan yang tertinggi terdapat di bentang laut Papua Barat sehingga ada menyebutnya *the heart of coral triangle*. Papua Barat juga memiliki 70% hutan mangrove alami yang mampu menyimpan karbon lebih besar dibandingkan hutan di daratan.⁵

Pada tanggal 19 Oktober 2015, Provinsi Papua Barat ditetapkan sebagai 'Provinsi Konservasi' sehubungan dengan deklarasi yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat, Bapak Abraham Oktavianus Ataruri.⁶ Deklarasi ini membawa Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi pertama di dunia.⁷ Adapun beberapa aturan terkait pengelolaan kawasan konservasi di tingkat pemerintah provinsi seperti Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7/2019 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat 2019-2038; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan pada Badan Layanan Umum Daerah

⁵ "Papua Barat," *Conservation International*, diakses 23 September 2022, <https://www.conservation.org/indonesia/lokasi/papua-barat>.

⁶ Ezrom Batorinding, "Press Release Peringatan Lima Tahun Deklarasi Provinsi Konservasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah Khusus No. 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat," *Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat*, diakses pada 4 Oktober 2022, <http://balitbangda.papuabaratprov.go.id/detailpost/press-release-peringatan-lima-tahun-deklarasi-provinsi-konservasi-dan-sosialisasi-peraturan-daerah-khusus-no-10-tahun-2019-tentang-pembangunan-berkelanjutan-di-provinsi-papua-barat>.

⁷ "Papua Barat Menjadi Propinsi Konservasi Pertama di Dunia!" *Indonesian Ocean Pride*, diakses 4 Oktober 2022, <https://indonesianoceanpride.org/id/berita/west-papua-becomes-worlds-first-conservation-province/>.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat; Peraturan Daerah Khusus No. 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat; serta peraturan-peraturan lainnya.

Besarnya potensi yang dimiliki oleh Papua Barat membuat pemerintah, baik pemerintah lokal maupun nasional, mulai memberikan sorotan pada provinsi ini. Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kementerian Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) mengambil langkah-langkah pembangunan infrastruktur Provinsi Papua Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,67 triliun. Di antaranya digunakan untuk bidang SDA sejumlah Rp 600 miliar, jalan dan jembatan sebanyak Rp 2,54 triliun, permukiman penduduk sebesar Rp 320 miliar, dan perumahan dengan jumlah Rp 200 miliar.⁸ Berbagai program pembangunan wilayah ini dapat dilihat dengan bertumbuhnya kota-kota baru, kampung-kampung baru, kemudian juga ada pemekaran-pemekaran wilayah administrasi pemerintah. Hal ini berdampak pada angka penurunan luas hutan alam pada tahun 2015 hingga 2019 mencapai 2.411 hektare. Hal ini berarti bahwa terjadi penurunan luas hutan alam selama periode 2015-2019 sebesar 1,18% dari total luas hutan alam yang sebelumnya seluas 269.132

⁸ “Infrastruktur Papua dan Papua Barat Terus Dibangun Kementerian PUPR, Dari Jalan Hingga Pemukiman,” *Kementerian Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat*, diakses 11 Januari 2023, <https://www.pu.go.id/berita/infrastruktur-papua-dan-papua-barat-terus-dibangun-kementerian-pupr-dari-jalan-hingga-pemukiman>.

Pada tahun 2017, CI menandatangani dokumen Perjanjian Kemitraan dengan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perjanjian kemitraan ini berisikan tentang pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) nasional suaka alam perairan (SAP) kepulauan Raja Ampat dan SAP kepulauan Waigeo sebelah barat. Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 63/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034. Tetapi tidak hanya sebatas di kawasan perairan, suaka alam juga termasuk kawasan yang berada di darat. Seperti yang telah tertuang dalam undang-undang (UU) yang berbunyi, “Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.”¹² Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dilakukan supaya kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

¹² Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49), Ps. 1(9).

Catatan penting terkait pembangunan Provinsi Papua Barat adalah kurang memperhatikan keberlanjutan ekosistem setempat. Program pembangunan kerap kali tidak memperhatikan efek yang ditimbulkan, hingga hal tersebut sering mengganggu kondisi ekosistem di sekitarnya. Seiring dengan berkembangnya pembangunan, manusia mulai melanggar batas yang menyebabkan keanekaragaman hayati yang kaya dan seimbang menjadi rapuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup mumpuni dalam upaya konservasi lingkungan.

Sangat menarik dan penting untuk membahas strategi CI dalam upaya konservasi lingkungan guna memelihara dan melindungi alam dari kerusakan dan kemusnahan ekosistem, investasi kualitas lingkungan hidup yang lebih baik di masa mendatang, serta menjadi sarana dalam mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini melihat upaya CI dalam kerja samanya dengan pemerintah dan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Papua Barat. Dalam hal ini, CI juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan terkait konservasi lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti ‘Strategi Lembaga *Conservation International* dalam Konservasi Lingkungan di Papua Barat Tahun 2017-2022’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, maka ditentukan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi lembaga Conservation International dalam konservasi lingkungan di Papua Barat tahun 2017-2022?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi lembaga *Conservation International* dalam konservasi lingkungan di Papua Barat tahun 2017-2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusinya melalui manfaat akademis maupun manfaat praktis. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi lembaga *Conservation International* dalam konservasi lingkungan di Papua Barat tahun 2017-2022. Untuk itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, wawasan, dan pemahaman bagi para akademisi dalam mengembangkan ilmu Hubungan Internasional (HI) di era kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber rujukan ataupun referensi bagi penelitian mendatang yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ke depan

terkait isu-isu lingkungan hidup. Diharapkan juga bagi masyarakat dapat mempunyai akses terhadap pembangunan yang tentunya tetap mempertahankan kondisi kelestarian alam.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan pijakan yang dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam proses penyusunan penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan data yang didapatkan peneliti. Adapun beberapa judul publikasi yang relevan dengan topik.

Pertama, terdapat artikel yang dimuat dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 9, No. 2* tahun 2021. Artikel ini ditulis oleh Retitha Kurnianda dengan judul *Peran (CIF) Conservation International Foundation dalam Konservasi Wilayah Laut Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2017*. Penyusunan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana peran CIF di Kabupaten Raja Ampat, Indonesia, dalam konservasi perairan laut di BLKB, khususnya pada konservasi terumbu karang. Ditemukan bahwa CIF menjalankan program-program yang sangat penting bagi kelestarian keanekaragaman hayati terumbu karang di wilayah BLKB Raja Ampat. Upaya yang dilakukan oleh CIF sangat membantu pemerintah Indonesia, terutama pemerintah Papua Barat, dalam menangani berbagai permasalahan terkait kerusakan terumbu karang, baik yang diakibatkan oleh kegiatan manusia maupun faktor alam. CIF memberikan fokusnya pada terumbu karang dalam program konservasi di Raja Ampat dengan beberapa program kerja seperti

memberikan informasi dan pengetahuan mengenai upaya konservasi kepada pemerintah dan masyarakat setempat, *learning, observation, recovery, monitoring*, dan *zona protection*. Pada capaian konservasi di Raja Ampat, CIF telah melakukannya perannya sebagai wadah, aktor, dan fasilitator dalam pengelolaan SDA di Raja Ampat melalui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.¹³

Terdapat persamaan antara pembahasan yang ada dalam artikel yang disusun oleh Retitha Kurnianda dengan penelitian ini, yaitu keduanya membahas peran CI sebagai INGO dalam upaya konservasi di Provinsi Papua Barat. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini, dalam artikel hanya dibahas mengenai peran konservasi wilayah perairan yang dilakukan oleh CI di kawasan BLKB, Provinsi Raja Ampat saja dengan batasan tahun 2014-2017. Sementara dalam penelitian membahas pengelolaan kawasan konservasi SDA di seluruh Provinsi Papua Barat, baik di wilayah perairan maupun daratan, dengan batasan tahun 2017-2022.

Kedua, yaitu penelitian skripsi yang ditulis oleh Feinoor Yudahastuti pada tahun 2017 lalu. Penelitian tersebut berjudul *Advokasi Conservation International (CI) Dalam Mendorong Konservasi Ekosistem Pesisir Pantai (Blue Carbon Initiative) Tahun 2014-2016 di Indonesia*. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh advokasi INGO terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui Program Inisiatif Karbon Biru tahun 2014-

¹³ Retitha Kurnianda, "Peran (CIF) *Conservation International Foundation* dalam Konservasi Wilayah Laut Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2017," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.9, No. 2 (2021): 378-394.

2016. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai latar belakang advokasi kebijakan yang dilakukan oleh INGO terhadap Pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwasannya isu-isu terkait lingkungan dan perubahan iklim sudah menjadi isu yang telah lama dibahas pada agenda-agenda internasional. Berkenaan dengan ini, terdapat advokasi transnasional yang mana keduanya harus diintegrasikan untuk mencegah kenaikan suhu global. Di Indonesia, mitigasi perubahan iklim sudah sejak lama dikenal. Namun, implementasinya di lapangan belum cukup baik. Di sinilah, INGO memiliki peran yang cukup penting dalam membantu dan mendorong terwujudnya upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas karbon di Indonesia. Salah satu INGO yang mendorong terwujudnya upaya mitigasi perubahan iklim dengan Program Inisiatif Karbon Biru (*Blue Carbon Initiative*) adalah CI. Inisiatif Karbon Biru sendiri merupakan program pengurangan emisi gas karbon melalui konservasi mangrove dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai peran CI dalam melakukan upaya advokasi untuk mendorong konservasi alam yang berada di wilayah pesisir pantai. Penelitian ini menunjukkan hasil dengan kesimpulan yang menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan CI dalam Program Inisiatif Karbon Biru.¹⁴

Berbeda dengan penelitian ini yang membahas seluruh wilayah Provinsi Papua Barat yang mencakup wilayah perairan dan wilayah darat, skripsi yang disusun oleh Feinoor ini hanya berfokus pada wilayah pesisir pantai di

¹⁴ Feinoor Yudahastuti, "Advokasi *Conservation International* (CI) dalam Mendorong Konservasi Ekosistem Pesisir Pantai (*Blue Carbon Initiative*) Tahun 2014-2016 di Indonesia" (skripsi, Universitas Brawijaya, 2017).

Kabupaten Kaimana saja. Sementara persamaan yang ada dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas upaya konservasi yang dilakukan oleh CI sebagai INGO yang memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kelestarian lingkungan.

Ketiga, terdapat skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bernama Nabila Fauziah dengan judul *Strategi Conservation International (CI) Indonesia dalam Konservasi Lingkungan di Bali Tahun 2014-2019*. Skripsi ini masih sangat segar, di mana penelitian ini disusun pada tahun 2022. Dibahas di dalam skripsi tersebut bahwasannya CI hadir sebagai INGO di Bali untuk melakukan upaya konservasi alam melalui Jaringan Konservasi Laut dan Konservasi Lahan dengan menggunakan pendekatan budaya. CI menggunakan pendekatan budaya lantaran masyarakat lokal yang kehidupannya masih sangat erat dengan budaya tradisional yang bersumber dari kepercayaan masyarakat Hindu Bali, yaitu Nyegara Gunung atau *Ridge to Reef*. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program kerja yang dilakukan CI Indonesia di Bali dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan menggunakan strategi *Global Civil Society* (GCS) dalam implementasinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CI Indonesia mampu membuat strategi-strategi yang dimiliki oleh GCS dapat dilihat dan didengar, sehingga CI

Indonesia dapat berhasil menjalankan tujuannya untuk menjaga kelestarian alam.¹⁵

Dipaparkan dalam skripsi tersebut bahwa CI menjadi penunjang penting bagi pelestarian lingkungan. Sama dengan penelitian yang dilakukan, skripsi ini menjadikan ekologi sebagai fokus yang sangat diperhatikan. Namun jika pada skripsi yang ditulis oleh Nabila ini membahas strategi konservasi lingkungan yang dilakukan oleh CI di Bali, penelitian ini berfokus pada upaya konservasi lingkungan di Provinsi Papua Barat.

Keempat, artikel penelitian yang ditulis oleh Agung Setyabudi pada bulan September 2021. Artikel yang dimuat di *Jurnal Good Governance Volume 17 No. 2* ini berjudul *Model Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam (Studi Kasus di Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat)*. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini bertujuan dalam menentukan model pemberdayaan masyarakat Kampung Saporken yang terletak di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Hal ini lantaran daerah Kampung Saporken merupakan daerah penyangga Kawasan Suaka Alam (KSA), yaitu Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat. Peran masyarakat dalam pengelolaan KSA selama masih sangat minim. Padahal keterlibatan masyarakat dapat membentuk hubungan yang saling menguntungkan antara alam dan sumber daya manusia (SDM). Sehingga, keterlibatan masyarakat Kampung Saporken dibutuhkan dalam pemanfaatan potensi Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat.

¹⁵ Nabila Fauziah, "Strategi *Conservation International* (CI) Indonesia dalam Konservasi Lingkungan di Bali Tahun 2014-2019" (skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

Pemberdayaan masyarakat kemudian dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat bersama dengan mitranya, yaitu *Flora & Fauna International* (FFI) dan CI. Adapun jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, antara lain dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis lahan hutan seperti *agroforestry*; tumpang sari; hutan kemasyarakatan; hutan rakyat; dan sebagainya. Sementara pemberdayaan masyarakat yang berbasis non-lahan hutan, antara lain penangkaran satwa; pemanfaatan hasil hutan; ekowisata; dan sebagainya. Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis non-lahan dengan pola usaha ekowisata dinilai sangat sesuai dengan potensi SDA yang dimiliki Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat, yaitu: wisata bahari (*snorkling/diving*), wisata pengamatan Burung Cenderawasih, pengelolaan *homestay*, wisata pantai, serta persewaan peralatan *snorkling/diving* dan perahu/*speedboat*. Komitmen para pihak pengelola Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat (BBKSDA Papua Barat, FFI, dan CI) sangat dibutuhkan dalam pengembangan ekowisata di kawasan ini. Selain memberikan akses pemberdayaan bagi masyarakat, beberapa hal perlu untuk diperhatikan dalam pengembangan ekowisata Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat, seperti mempertimbangkan daya dukungnya, mulai perencanaan, kelembagaan, *monitoring* dan evaluasi, serta aksesibilitas sarana prasarananya.¹⁶

¹⁶ Agung Setyabudi, "Model Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam (Studi Kasus di Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat)," *Jurnal Good Governance Volume 17* No. 2 (2021): 137-153, <https://doi.org/10.32834/gg.v17i2.337>.

Artikel ini masih membatasi penelitiannya hanya pada satu kampung di Kabupaten Raja Ampat. Sementara penelitian ini menjadikan tingkat provinsi sebagai subjek penelitian. Namun terdapat persamaan pembahasan yang terdapat pada artikel ini dan penelitian, yaitu adanya kerja sama berbagai pihak terkait dalam pengelolaan ekologi kawasan, baik kawasan yang berada di darat maupun kawasan bahari yang memanfaatkan potensi sumber daya laut.

Kelima, terdapat artikel yang dimuat dalam *Hasanuddin Journal of International Affairs Volume 1, No 2* yang dipublikasi pada bulan Agustus 2021. Artikel ini ditulis oleh Timothy Febrian Theodorus, Aswin Baharuddin, dan Bama Andika Putra dengan judul *Peran Conservation International (CI) terhadap Konservasi Perairan di Bali (Studi Kasus: Desa Tulamben, Bali)*. Artikel ini meneliti bagaimana strategi CI terhadap Konservasi Perairan di Tulamben, Bali. Tulamben sendiri merupakan kawasan rekreasi yang sudah sangat terkenal di kalangan penyelam. Sehingga, banyak orang yang menjadikan Tulamben sebagai destinasi wisata. Namun, tingginya intensitas kunjungan wisatawan di Tulamben dapat memengaruhi ekosistem. Kurangnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat merusak ekosistem laut Tulamben. Selain itu, pengelolaan wilayah pesisir yang belum maksimal juga dapat menurunkan potensi yang dimiliki oleh kawasan ini. Hal ini kemudian menjadi perhatian bagi CI untuk menginisiasi kerja sama dengan Pemerintah Desa Tulamben dalam pengelolaan kebijakan dan regulasi bersama. CI juga mengajak serta masyarakat setempat untuk berpartisipasi

dalam integrasi program KKP. Selain itu, artikel ini juga meneliti dampak yang dihasilkan dari peran serta CI terhadap Konservasi Perairan di kawasan Tulamben, Bali. Dijelaskan dalam artikel bahwa CI membawa banyak dampak bagi Konservasi Perairan di Tulamben, Bali yang dibagi berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi sosial; dimensi lingkungan; dan dimensi ekonomi. Dampak sosial dapat dilihat pada peran aktif masyarakat yang turut serta dalam program-program yang dimiliki oleh CI. Secara lingkungan, terjadi peningkatan varietas ikan di areal kawasan konservasi Desa Tulamben. Kemudian dampak secara ekonomi, yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas akomodasi perhotelan di Tulamben serta tenaga kerja lokal.¹⁷

Persamaan yang ada pada artikel ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan CI sebagai subjek penelitian. Dalam artikel yang berjudul *Peran Conservation International (CI) Terhadap Konservasi Perairan di Bali (Studi Kasus: Desa Tulamben, Bali)* ini dibahas mengenai urgensi konservasi perlu dilakukan dalam pelestarian lingkungan di Bali. Hal ini lantaran Bali merupakan tujuan wisata yang ramai orang datang. Sama halnya yang diteliti dalam skripsi ini, di mana Papua Barat yang memiliki keindahan dan kekayaan alam menjadi tujuan wisata, memerlukan upaya pelestarian lingkungan. Meski begitu, terdapat juga perbedaan yang ada pada artikel dan penelitian ini. Artikel hanya membahas mengenai konservasi

¹⁷ Timothy Febrian Theodorus, Aswin Baharuddin, dan Bama Andika Putra, "Peran *Conservation International* (CI) terhadap Konservasi Perairan di Bali (Studi Kasus: Desa Tulamben, Bali)," *Hasanuddin Journal of International Affairs Volume 1*, No 2 (2021), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/17674/7267>.

wilayah perairan. Sementara pada penelitian ini dibahas mengenai kegiatan konservasi, baik di wilayah daratan maupun perairan Provinsi Papua Barat.

Keenam, terdapat artikel berjudul *A Holistic Approach to Manta Ray Conservation in the Papuan Bird's Head Seascape: Resounding Success, Ongoing Challenges* yang disusun oleh Edy Setyawan dkk. Edy melakukan penelitian bersama dengan 16 peneliti lainnya. Hasil penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal *Marine Policy Volume 137* yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2022 lalu. Dalam artikel ini, dapat dilihat mengenai perkembangan progresif dari pendekatan holistik dalam kegiatan konservasi Pari Manta di Raja Ampat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang strategi apa saja yang digunakan, agar dapat dijadikan sebagai informasi terkait upaya konservasi elasmobranchii (yang termasuk di dalamnya hiu dan pari) secara meluas di seluruh Indonesia dan juga negara-negara tropis lainnya. Hal ini lantaran adanya tantangan dari jumlah populasi elasmobranchii yang mengalami penurunan tajam. Dan yang lebih memrihatinkan adalah selama lebih dari 3 (tiga) dekade, Indonesia menjadi negara yang memimpin dalam angka penangkapan ikan hiu.

Melihat faktanya kini, populasi Pari Manta di Provinsi Papua Barat sudah terlindungi dan terdapat peningkatan yang pesat, khususnya di Kabupaten Raja Ampat. Manajemen Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang baik serta perlindungan habitat Pari Manta dianggap penting bagi pemulihan populasi Elasmobranchii. Dengan pendekatan holistik yang diterapkan terhadap konservasi dan pengelolaan Pari Manta oleh instansi Pemerintah Raja Ampat

telah memungkinkan populasi Manta di nusantara juga ikut berkembang pesat. Dimulai dengan jaringan luas KKP yang dikelola secara kolaboratif oleh masyarakat lokal dan pemerintah serta didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan sektor pariwisata swasta. Inisiatif ini dilakukan dengan menambahkan pembatasan jumlah alat tangkap, suka hiu dan pari, kampanye kesadaran Manta nasional, perlindungan nasional perundang-undangan, dan komponen pengelolaan pariwisata yang berkembang oleh berbagai pihak.¹⁸

Dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, terdapat persamaan yang ada dalam artikel Edy Setyawan dkk., yaitu sama-sama membahas konservasi alam yang berada di Provinsi Papua Barat. Tetapi, artikel membahas konservasi Pari Manta—yang mana ini merupakan upaya konservasi wilayah laut. Sedangkan dalam penelitian dibahas seluruh wilayah Papua Barat yang mencakup wilayah lautan dan juga daratan. Selain itu, dalam artikel lebih fokus pada upaya kolektif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat lokal. Namun pada penelitian ini, pembahasan peran LSM lebih difokuskan.

Ketujuh, artikel berjudul *A Time for Locally Driven Development in Papua and West Papua* yang dimuat dalam jurnal *Development in Practice Volume 29 – Issue 6* tahun 2019. Artikel ini ditulis oleh Mochamad Indrawan dkk. Berdasar pada keanekaragaman hayati yang luas di Tanah Papua, pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat menjadi salah satu keuntungan

¹⁸ Edy Setyawan dkk., “A Holistic Approach to Manta Ray Conservation in the Papuan Bird’s Head Seascape: Resounding Success, Ongoing Challenges,” *Marine Policy Volume 137* (Maret 2022): 104953, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104953>.

yang bisa didapatkan. Namun kemanfaatan dari pembangunan ini harus dirasakan oleh masyarakat lokal. Hal ini tentunya bergantung juga pada bagaimana masyarakat lokal memandang konsep pembangunan serta implementasinya di lapangan. Dijelaskan dalam artikel bahwa para pemangku kepentingan Papua telah menyiapkan rencananya sesuai dengan versi mereka sendiri. Terdapat beberapa kisah keberhasilan masyarakatnya yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mengembangkan rasa kepercayaan diri pada kemampuan masyarakat adat Papua untuk memimpin pembangunan mereka sendiri.

Sejalan dengan deklarasi Papua Barat sebagai provinsi konservasi, penegakan konservasi menyerukan perlindungan ekonomi bagi masyarakat adat dan kontrol yang ketat terhadap izin penebangan hutan. Namun konservasi saja tidak cukup untuk melindungi keanekaragaman hayati. Peran kebijakan lokal yang sangat menentukan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati belum terlibat secara efektif. Sehingga, pendekatan multi-*stakeholder* seperti kemitraan publik-swasta-masyarakat perlu dijalankan. Hal ini diketahui dapat berhasil dengan baik. Partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan harus tetap diutamakan. Nilai-nilai tradisional, kearifan, dan kekayaan budaya lokal harus tetap dipertahankan. Berpusat pada pembangunan ekonomi yang dikelola oleh masyarakat lokal, akses pasar menjadi lebih baik lagi bagi pembangunan kapasitas lokal.¹⁹

¹⁹ Mochamad Irawan dkk., "A Time for Locally Driven Deveopment in Papua and West Papua," *Development in Practice Volume 29 – Issue 6* (2019): 817-823, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09614524.2019.1609907>.

Sebagaimana judulnya, penelitian ini berbeda dengan artikel ini. Sama seperti tinjauan literatur sebelumnya, dalam artikel dijabarkan bahwa peran masyarakat lokal/adat yang menjadi fokus yang diteliti. Sementara penelitian ini fokus pada peran INGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yaitu CI. Namun, penelitian juga membahas peran dari masyarakat lokal, tetapi tidak menjadi satu fokus pembahasan utama.

Kedelapan, terdapat skripsi yang diajukan oleh Addila Islamy pada tahun 2020 dengan judul *Kerja Sama Indonesia dengan PanEco dalam Melakukan Konservasi Orangutan pada Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP)*. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Addila ini adalah untuk menjelaskan kerja sama PanEco dalam program SOCP di Indonesia periode 2015-2018. Di sini dapat dilihat sebuah ancaman dari orangutan yang semakin berkurang populasi dan juga habitatnya. Kerusakan hutan merupakan salah satu penyebab berkurangnya habitat orangutan. Ancaman ini akhirnya memunculkan aksi global yang dijalankan oleh masyarakat, *stakeholders*, perusahaan swasta, serta NGO guna menjaga ekosistem hutan Indonesia. PanEco sebagai non-profit NGO yang berkomitmen aktif dalam upaya konservasi alam dan spesies langka juga terlibat aksi melalui program SOCP. Dalam program ini, PanEco turut membantu kinerja pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kepunahan orangutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara PanEco dan pemerintah Indonesia dapat dikatakan berhasil dan efektif. Keduanya sama-sama memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dan yang paling penting, tujuan konservasi orangutan tercapai.

Sebagai INGO, PanEco merupakan mitra yang cocok untuk Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada saat PanEco berhasil dalam memilah jenis orangutan kemudian memonitori kebiasaannya. Ini menjadi salah satu hal yang perlu diketahui untuk melepaskan orangutan ke habitat aslinya.²⁰

Kerja sama antara INGO dan juga pemerintah juga dibahas dalam penelitian ini, di mana pada penelitian ini sedikit membahas kerja sama CI sebagai INGO dan instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam berbagai kebijakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Addila yang hanya membahas satu jenis satwa yang digunakan sebagai fokus konservasi, penelitian ini berfokus pada konservasi alam.

Kesembilan, skripsi yang berjudul *Upaya Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) dalam Melakukan Konservasi Orangutan Kalimantan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah*. Skripsi ini disusun oleh Sarifa Rahma di tahun 2018. Pada penelitiannya ini, Sarifa ingin mengetahui bagaimana upaya BOSF dalam melakukan konservasi orangutan Kalimantan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Sama halnya seperti tinjauan literatur sebelumnya, permasalahan penurunan populasi orangutan masih menjadi ancaman yang lagi-lagi disebabkan oleh deforestasi/kerusakan hutan. Untuk mengurangi hal tersebut, konservasi menjadi satu solusi yang dapat dilakukan untuk melestarikan orangutan Kalimantan. BOSF menjadi salah satu INGO yang menaruh fokus konservasi dengan beberapa upaya agar dapat melestarikan orangutan Kalimantan dan habitatnya. Konservasi dilakukan

²⁰ Addila Islamy, "Kerja Sama Indonesia dengan PanEco dalam Melakukan Konservasi Orangutan pada *Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP)*" (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2020).

melalui konservasi *ex-situ* dan *in-situ*, serta pemberdayaan masyarakat melalui program Samboja Lestari, Nyaru Menteng, dan Mawas. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh masyarakat adat untuk mengurangi ancaman kepunahan orangutan Kalimantan dan mengurangi tingkat deforestasi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. BOSF juga bekerja sama dengan aktor-aktor negara maupun non-negara pada bidang pendidikan dan kampanye, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain terkait dengan lingkungan hidup yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi dalam melestarikan orangutan Kalimantan dan habitatnya.²¹

Dalam artikel ini, dapat terlihat bahwa BOSF benar-benar merupakan INGO yang berperan aktif dalam melestarikan orangutan dan habitatnya. Hal ini juga yang bisa ditemui dalam penelitian ini. CI sebagai INGO yang berfokus pada upaya konservasi lingkungan hidup dibahas peranannya dalam melestarikan alam Papua Barat. Adapun, CI juga bekerja sama dengan banyak pihak terkait guna mendukung upaya konservasi yang dijelankannya.

Kesepuluh, terdapat artikel yang ditulis oleh Eca Chairunnisa. Artikel yang dimuat dalam *Global Political Studies Journal Vol. 2 No 1* pada bulan April 2018 ini berjudul *Peranan World Wide Fund for Nature (WWF) dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa di Indonesia* ini. Populasi badak jawa yang terancam punah membuat WWF sebagai INGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup turun tangan menangani permasalahan ini. WWF turut serta

²¹ Sarifa Rahma, "Upaya *Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF)* dalam Melakukan Konservasi Orangutan Kalimantan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah" (Skripsi, Universitas Kristen Parahyangan, 2018).

dalam upaya pelestarian spesies langka ini agar dapat hidup di habitat aslinya. Beberapa upaya pelestarian ini di antaranya adalah Program Pelestarian Badak, Analisis Nutrisi dan Hormon Badak Jawa Melalui Kotoran, *Monitoring* Badak Jawa, *Disease Surveillance*, Manajemen Habitat, Penelitian tentang Badak Jawa, Program Pendampingan Produksi Patung Badak sebagai Suvenir khas Ujung Kulon, Program Pemberdayaan Masyarakat, Ekowisata yang Memerhatikan Eksistensi Badak Jawa, dan Pengamanan Badak. Upaya tersebut pada akhirnya membuahkan hasil yang cukup menyenangkan. Terdapat peningkatan pada populasi badak jawa. Dengan demikian, peran WWF dapat dinilai cukup signifikan dalam upaya konservasi badak jawa di Indonesia.²²

Di dalam artikel ini dibahas mengenai bagaimana sebuah INGO membawa peran yang cukup signifikan dalam upaya konservasi badak jawa. Salah satu upaya yang menarik adalah program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya konservasi badak jawa sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki. Hal ini juga dibahas dalam penelitian bahwa CI dalam upaya konservasi alam juga mengajak serta masyarakat lokal di Papua Barat.

F. Argumentasi Utama

Dalam penelitian berjudul “Strategi Lembaga *Conservation International* dalam Konservasi Lingkungan di Papua Barat Tahun 2017-2022”, peneliti memiliki argumentasi utama bahwa dalam upaya konservasi lingkungan yang

²² Eca Chairunnisa, “Peranan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa di Indonesia,” *Global Political Studies Journal* Vol. 2 No 1 (April 2018), <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2012/1355>.

berada di Provinsi Papua Barat, CI memainkan peranan yang amat penting. Dalam upayanya ini, CI terlibat kerja sama dengan pihak-pihak terkait guna mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu untuk mengamankan lingkungan dan keanekaragaman yang berada di alam untuk kesejahteraan umat manusia.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian agar isi yang termuat di dalamnya dapat dipahami dengan baik. Untuk itu, skripsi ini disusun secara sistematis meliputi bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal terdapat sampul, halaman judul, persembahan, pernyataan dan pertanggungjawaban penulisan skripsi, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, dan daftar gambar. Kemudian pada bagian utama terdiri dari bagian pendahuluan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, penyajian data analisis data, serta penutup. Sistematika bagian utama terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, argumentasi utama, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

Bab ini memaparkan kerangka konseptual yang di gunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Kerangka konseptual ini digunakan sebagai alat bantu untuk menjawab rumusan masalah.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam bab ketiga ini dipaparkan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yang disusun secara sistematis meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian dan tingkat analisis (*level of analysis*), tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

4. BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Bab keempat merupakan bab pembahasan yang juga merupakan bab inti dari penyusunan skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan mengenai berbagai pembahasan hasil temuan terkait dengan strategi lembaga CI dalam konservasi lingkungan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2017-2022.

5. BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi subbab berupa kesimpulan dan saran/rekomendasi.

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

Pada bab kerangka konseptual dijabarkan mengenai kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti. Bab ini berisikan penjelasan singkat serta mendalam yang digunakan dalam menjelaskan variabel penelitian serta menganalisis hasil penelitian. Sehingga, ke depannya dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Keseluruhan konseptualisasi dijabarkan ke dalam 4 (empat) subbab, yaitu konsepsi tentang Strategi, *Conservation International* (CI), *International Non-Governmental Organization* (INGO), dan Konservasi Lingkungan.

A. Strategi

Istilah ‘strategi’ pada awalnya muncul pada abad ke-18 dan ke-19.²³ Dalam level pembahasan sistem internasional, strategi diambil dari Teori Permainan atau *Game Theory* yang mana teori tersebut dibedakan menjadi *games of skill*, *games of change*, dan *games of strategy*. Strategi adalah taktik di mana tindakan yang terbaik untuk dilakukan oleh setiap pemain bergantung pada apa yang pemain lain lakukan.²⁴ Dalam level pembahasan ini, konsep strategi menjelaskan adanya ketergantungan perilaku setiap aktor internasional kepada aktor lain dalam mengambil keputusan. Strategi pada dasarnya adalah

²³ Chintya Dewi Purba, “Strategi *Hybrid War* Rusia pada Konflik Ukraina Tahun 2014 – 2018 (*Russian Hybrid War Strategy in The Ukraine Conflicts on 2014 – 2018*)” (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2020).

²⁴ Thomas C. Schelling, *The Strategy of Conflict: With a New Preface by the Author* (Cambridge: Harvard University Press, 1980), 3.

tentang pilihan atau preferensi untuk menentukan cara yang terbaik untuk sampai pada keadaan atau kondisi masa depan²⁵ yang dikehendaki.

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), UNEP, dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) berkolaborasi menyusun *World Conservation Strategy* (WCS) untuk membantu memajukan pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui konservasi SDA hayati. WCS menjelaskan bagaimana konservasi SDA hayati dapat berkontribusi baik bagi kelangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi isu-isu yang menjadi prioritas dan bagaimana cara untuk menanganinya, serta memberikan usulan mengenai cara-cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Secara khusus, strategi ini mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas konservasi maupun untuk mengintegrasikan konservasi dan pembangunan.

Terdapat bagian khusus dalam dokumen ini yang menjelaskan kerangka strategi untuk tingkat nasional dan subnasional (dalam penelitian ini yang dimaksud adalah tingkat provinsi). Untuk mencapai tujuan konservasi, 4 (empat) prinsip strategi berikut harus dipertimbangkan.

1. *Integrate* (mengintegrasikan)

Permasalahan yang banyak terjadi salah satunya dikarenakan pelaksanaan pembangunan yang tidak disertai dengan konservasi. Pembangunan daerah kerap bersinggungan dengan pengelolaan sumber

²⁵ Harry Richard Yarger, *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy* (Carlisle, PA: Strategic Study Institute, U.S. Army War College, 2006), 6.

daya hayati. Sehingga, integrasi antara konservasi dan pembangunan merupakan sebuah hal yang utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi.

2. *Retain options* (mempertahankan opsi)

Seringkali program-program yang telah ada tidak cukup untuk menjamin bahwa pengelolaan SDA yang dilakukan tersebut merupakan yang paling baik dan memiliki kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, opsi pengelolaan SDA harus sebanyak mungkin. Hal ini berguna untuk mengetahui opsi mana yang paling bisa mendekati tujuan konservasi.

3. *Mix cure and prevention* (mengkombinasikan solusi dan pencegahan)

Permasalahan yang terjadi saat ini ke depannya bisa menimbulkan efek domino bagi ekosistem. Oleh karena itu, strategi untuk konservasi harus memikirkan bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, di samping juga bagaimana tindakan pencegahan yang dapat dilakukan supaya permasalahan tersebut tidak menjadi lebih buruk.

4. *Focus on causes as well as symptoms* (fokus pada penyebab serta gejala)

Memperhatikan gejala yang ada pada suatu permasalahan sangat perlu untuk dilakukan supaya tidak terlambat dalam melakukan tindakan pencegahan. Walaupun pada saat gejala muncul, sering kali sudah terlambat dalam mengambil tindakan untuk menangani penyebabnya. Dan itu semua di luar kendali para pelaku konservasi.

WCS utamanya ditujukan untuk 3 (tiga) kelompok berikut:

1. Pemerintah pembuat kebijakan dan para penasihat. Hanya sedikit pemerintahan di dunia ini yang memiliki sumber pendanaan dan teknis untuk mengatasi semua masalah konservasi SDA hayati sekaligus. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan cara-cara untuk mengatasi hambatan utama konservasi.
2. Konservasionis dan pihak lain yang terkait langsung dengan konservasi SDA hayati. Strategi dalam hal ini mengindikasikan area yang paling membutuhkan tindakan konservasi.
3. Praktisi pembangunan, termasuk lembaga bantuan; industri perdagangan; dan serikat pekerja. Untuk kelompok yang ketiga ini, strategi menunjukkan bahwa konservasi meningkatkan prospek pembangunan berkelanjutan dan mengintegrasikan konservasi ke dalam proses pembangunan.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan WCS. Strategi ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis bagaimana strategi konservasi SDA yang dilakukan oleh CI di Papua Barat.

²⁶ *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, United Nations Environment Programme, dan World Wide Fund for Nature, World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development/prepared by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Gland, Switzerland: I.U.C.N., 1980, 4 pamphlets in 1 portfolio: ill., maps.*

masyarakat. Upaya pemberdayaan ini didasarkan pada ilmu pengetahuan, kemitraan, dan praktik lapangan.²⁸

Dalam perjalanannya, CI telah membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, pemerintah, lembaga penelitian atau akademisi, berbagai yayasan dan organisasi, serta sektor swasta. Melalui kemitraan yang terjalin ini dapat memunculkan berbagai solusi yang inovatif mengenai kondisi alam yang selalu berubah. Berbagai inovasi tersebut diperuntukkan sebagai langkah dalam menjaga alam, seperti mengurangi deforestasi, meningkatkan praktik pertanian, melindungi ekosistem alami sebagai penyerap karbon, dan mengembangkan standar untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi yang efektif. CI juga berusaha untuk meningkatkan hubungan kerja samanya dengan berbagai pihak dalam memerangi perubahan iklim dengan memberikan lebih banyak kontribusinya dengan memberikan demonstrasi kepada masyarakat, memberikan saran bagi para pembuat kebijakan, dan memobilisasi jaringan perusahaan besar serta memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan.²⁹ Kemitraan tersebut merupakan elemen yang penting guna mendukung tercapainya tujuan yang dimiliki oleh CI, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia.

Saat ini, CI telah berada di 30 negara yang tersebar di 6 (enam) benua,³⁰ salah satunya berada di Indonesia. Indonesia adalah satu wilayah di muka

²⁸ "About Conservation International: Fighting to Protect Nature for People," *Conservation International*, diakses 19 September 2022, <https://www.conservation.org/about>.

²⁹ "Conservation International Foundation (CI)," *Climate Finance Navigator*, diakses 19 September 2022, <https://cfn.pacificclimatechange.net/node/14>.

³⁰ "Conservation International Foundation," *Green Climate Fund*, diakses 19 September 2022, <https://www.greenclimate.fund/ae/ci>.

bumi ini yang bisa dibilang paling kaya keanekaragaman hayatinya. Tidak hanya keanekaragamannya saja, tetapi ketersediaan sumber daya hayatinya juga tinggi. Sehingga, sudah pasti organisasi internasional yang bergerak di bidang konservasi *biodiversity* (keanekaragaman hayati) seperti CI melihat wilayah ini sangat-sangat penting untuk dilestarikan. CI hadir di Indonesia sejak tahun 1991 dengan mitra utama departemen kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)) karena pada waktu itu, semua pekerjaan konservasi laut maupun darat ada di bawah kewenangan departemen kehutanan.³¹ Selain itu, CI juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan seperti KKP, pemerintah daerah, serta mitra lainnya.

Di Indonesia sendiri, CI memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta. CI juga memiliki banyak kantor cabang yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 2 (dua) kantor cabang, yaitu Kantor Medan dan Kantor Tapanuli Selatan yang terletak di Kota Padangsidimpuan. Selain itu, terdapat Kantor Jawa Barat yang terletak di Kota Bandung dan Kantor Bali yang berlokasi di ibu kota provinsi, yaitu Kota Denpasar. Kemudian yang menarik, datangnya dari Provinsi Papua Barat. Papua Barat memiliki kantor cabang terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 5 (lima) kantor cabang, di antaranya ada Kantor Manokwari, Kantor Sorong, Kantor Waisai, Kantor Fakfak, dan Kantor Kaimana. Ini merupakan satu hal yang menarik. Papua Barat bukanlah provinsi terbesar di Indonesia. Namun,

³¹ Meity Mongdong, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2023.

Papua Barat memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri hingga CI membuka banyak kantor cabangnya di wilayah Papua Barat.

C. *International Non-Governmental Organization*

Di era globalisasi sekarang ini, interaksi yang terjadi di dalam dunia internasional tidak hanya dimayoritasi oleh aktor negara saja. Aktor non-negara kini semakin menunjukkan eksistensinya melalui tergabungnya aktor-aktor non-negara dalam kelompok global yang dimanfaatkan menjadi tempat untuk mencapai kepentingannya. Kelompok global yang berisi aktor-aktor non-negara disebut dengan *dengan International Non-Governmental Organization* (INGO). *The United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) mendefinisikan INGO sebagai organisasi yang tidak didirikan berdasarkan kesepakatan antarpemerintah, termasuk organisasi yang menerima anggota yang ditunjuk oleh otoritas pemerintah.³²

Dalam berdirinya suatu INGO, terdapat berbagai peran yang dimainkan guna mencapai kepentingannya masing-masing. Di antara berbagai macam peran yang dimainkan INGO, terdapat 6 (enam) klasifikasi sebagai berikut.³³

1. Pembangunan dan Pengoperasian Infrastruktur

INGO menjalankan perannya dengan mendapatkan, menyebar, dan mengelola pengembangan tanah, membuat kawasan perumahan, membangun konstruksi, dan menjalankan serta merawat infrastruktur; misalnya seperti toilet umum dan pelayananan pengelolaan limbah. INGO

³² "What is international non-governmental organization (INGO)?" *Union of International Association*, diakses 25 September 2022, <https://uia.org/faq/yb4>.

³³ Hari Srinivas, "Roles of NGOs," *Global Development Research Center* (GDRC), diakses pada 26 September 2022, <https://www.gdrc.org/ngo/ngo-roles.html>.

juga membangun pelayananan pemasok bahan konstruksi dan usaha ekonomi dengan masyarakat lainnya. Terdapat beberapa INGO yang dapat dijadikan contoh yang melakukan peran pembangunan dan pengoperasian infrastruktur, antara lain *Caritas Czech Republic* (CCR) yang membidangi pembangunan infrastruktur/bangunan dan pemulihan psikososial,³⁴ *Cooperative Housing Foundation* (CHF) yang mengembangkan kawasan rumah penampungan, membangun ulang infrastruktur yang sudah tidak layak, atau membangun sistem pengairan,³⁵ *Help E.V. (Hilfe sur Selbsthilfe e.v)* yang memberikan bantuan di bidang infrastruktur terkait permasalahan kesehatan, kawasan perumahan, pengairan, saluran air, dan mendirikan tempat pendidikan, serta memberikan dukungan ketika terjadi bencana alam dan konflik di masyarakat;³⁶ serta beberapa INGO lainnya.

2. Mendukung Inovasi, Demonstrasi, dan Proyek Percobaan

INGO mendukung dan membantu proyek yang digarap oleh pemerintah. INGO dalam hal ini dapat memilih tempat dan waktu mana yang mereka bantu. Salah satu contoh INGO yang melakukan peran ini adalah CI yang telah melaksanakan proyek pengendalian atas terjadinya

³⁴ Direktur Sosial Budaya dan OINB, *Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, 2011), 50, diakses pada 26 September 2022,
<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9CdWt1L1Nvc2J1ZCUyME9JTkIvRGlyZWt0b3JpJTIwT3JnYW5pc2FzaSUyMEludGVybmFzaW9uYWwIMjBOB24tUGVtZXJpbmRhaCUyMGRpJTlwSW5kb25lc2lhLnBkZg==>.

³⁵ *Ibid.*, 66.

³⁶ *Ibid.*, 84.

illegal logging berupa *pilot project* di Taman Nasional (TN) Leuser dan Kerinci Sebat.³⁷

3. Memfasilitasi Komunikasi

INGO dapat memfasilitasi komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atau pun sebaliknya, dari pemerintah ke masyarakat. Komunikasi kepada pemerintah dilakukan dengan memberikan informasi mengenai hal-hal yang dialami oleh masyarakat. Kemudian komunikasi kepada masyarakat ialah dengan menyalurkan informasi domestik terkait dengan hal-hal yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. INGO dalam hal ini juga dapat bertukar informasi dengan organisasi lain yang memiliki kepentingan yang sama. Salah satu INGO yang telah menunjukkan perannya dalam memfasilitasi komunikasi adalah *Migrant CARE*. *Migrant CARE* membangun strategi komunikasi dalam rangka upaya perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran. Dalam hal ini *Migrant CARE* mengadakan webinar yang dapat diikuti oleh kalangan umum. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dari Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada masyarakat mengenai upaya pemerintah terkait perlindungan pekerja migran melalui penyusunan aturan turunan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja

³⁷ Ibid., 64.

*servare (to keep, to save what we have).*⁴³ Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa konservasi adalah upaya bersama untuk memelihara milik kita.

Sementara itu, konservasi alam (*environmental conservation*) adalah praktik yang dijalankan oleh manusia dalam menyelamatkan lingkungan dari kepunahan dan kerusakan ekosistem—yang utamanya disebabkan oleh aktivitas manusia.⁴⁴ Gagasan mengenai istilah konservasi pertama kali dipopulerkan oleh Gifford Pinchot pada tahun 1900-an. Pinchot memiliki kepedulian yang besar terhadap perlindungan hutan di AS. Hal ini lantaran sebagian besar hutan ditebang habis dalam kurun waktu yang bersamaan. Pinchot merasa tidak senang terhadap hal tersebut, karena Ia melihat hutan sebagai SDA berupa kayu yang sangat berharga. Dari sudut pandangnya, hutan seharusnya dikelola dengan cara-cara yang tepat hingga dapat memungkinkan perkembangan SDM-nya. Kepedulian yang dimiliki oleh Pinchot ini pada akhirnya membawa julukan ‘Bapak Konservasi AS’ bagi dirinya.⁴⁵

Namun jauh sebelum didefinisikan secara luas, konservasi lingkungan telah disinggung dalam naskah Jawa kuno berjudul *Serat Centhini* yang ditulis pada tahun 1757-1881. Kosmologi Jawa melihat konservasi lingkungan sebagai penyatuan antara manusia dan Tuhan (*manunggaling kawon lan*

⁴³ Eko Handoyo & Tijan, *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi: Pengalaman Universitas Negeri Semarang* (Semarang: Widya Karya Press, 2010), 15.

⁴⁴ “*Methods and Importance of Environmental Conservation*,” *Conserve Energy Future*, diakses 27 September 2022, <https://www.conserve-energy-future.com/methods-and-importance-of-environmental-conservation.php>.

⁴⁵ “Gifford Pinchot (1865-1946) — 4th Chief of the Division of Forestry, 1898-1905 & 1st Chief of the Forest Service, 1905-1910,” *Forest History Society*, diakses 27 September 2022, <https://foresthistor.org/research-explore/us-forest-service-history/people/chiefs/gifford-pinchot-1865-1946/>.

Di Indonesia, bab perihal konservasi lingkungan telah tertuang dalam UU Konservasi Hayati atau UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1. Pasal 1 (2)

“Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.”

2. Pasal 2

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.”

3. Pasal 3

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.”

4. Pasal 4

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.”

5. Pasal 5

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- 1) perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- 2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- 3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.”

UU ini memiliki beberapa Peraturan Pemerintah (PP), di antaranya:

1. PP 68/1998 tentang pengelolaan KSA dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA);
2. PP 7/1999 tentang pengawetan/perlindungan tumbuhan dan satwa;
3. PP 8/1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar/TSL;
4. PP 36/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa (SM), TN, taman hutan raya (Tahura) dan taman wisata alam (TWA).

Selain itu, terdapat juga UU terkait konservasi lingkungan, yaitu UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tertuang dalam pasal 1 (18) mengenai definisi dari konservasi yang berbunyi, “Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.” Maka dari itu, lingkungan hidup di Indonesia wajib dijaga dan diorganisir dengan optimal sesuai dengan asas kewajiban negara, asas keberlangsungan, dan asas peradilan. Manajemen lingkungan hidup wajib berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang dilaksanakan sesuai dengan asas demokrasi,

pengakuan, pemberian penghargaan, desentralisasi, serta kehati-hatian atas keberagaman kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Pada konteks penelitian ini, konservasi ialah aktivitas yang dilaksanakan untuk menjaga dan melestarikan berbagai potensi alam yang dimiliki Provinsi Papua Barat. Tidak hanya terbatas pada pelestarian lingkungan, namun istilah konservasi yang dimaksud dalam penelitian ini juga menjaga, menjunjung tinggi, dan mengembangkan nilai-nilai luhur dan budaya di masyarakat demi kesempurnaan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan konsep konservasi menurut CI, di mana pada prinsipnya adalah melindungi SDA supaya masyarakat yang bergantung darinya tidak kekurangan, tidak kehilangan sumber pangan, tidak kehilangan sumber air, dan tidak kehilangan sumber-sumber kehidupannya—di samping melestarikan *biodiversity*.⁴⁷ Hal ini didasarkan pada 3 (tiga) pilar konservasi berikut:

1. melindungi keanekaragaman hayati (*biodiversity*);

Komponen ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem serta untuk menjaga keanekaragaman hayati supaya tidak punah dan berkurang. Sehingga, keseimbangan alam tidak terpengaruh.

2. melestarikan SDA dan warisan budaya;

Komponen ini ditujukan untuk menjaga cadangan energi strategis supaya tidak punah. Pengelolaan SDA dalam hal ini juga disesuaikan dengan tradisi atau kearifan lokal masyarakat setempat.

⁴⁷ Meity Mongdong, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2023.

3. Memanfaatkan SDA terbarukan yang berkelanjutan.

Komponen ini ditujukan untuk mengembangkan keanekaragaman sumber daya energi (SDE) dan maksimalisasi kegunaan SDE baru secara bijak. Sekaligus juga kampanye pemanfaatan SDE yang ramah lingkungan.⁴⁸

E. *Common Property Resource*

Common property resources ialah SDA yang dapat dikelola oleh masyarakat bersama dan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang bukan komunitasnya. Tidak jarang yang terjadi selama ini peran dari masyarakat lokal kerap terpinggirkan.⁴⁹ Untuk itu, konsep *common property* perlu digalakkan untuk menjaga hak-hak masyarakat terhadap SDA yang berada di mana masyarakat itu bertempat tinggal dan menggantungkan hidupnya. Dalam hal ini, pemanfaatan SDA harus dikelola oleh institusi lokal maupun internasional yang berada di wilayah tersebut dengan inisiasi langsung oleh masyarakatnya. Masyarakat yang harus turun tangan dalam mengatur mekanisme pemanfaatan SDA secara proporsional. Pada prinsipnya, *common property* merupakan pemanfaatan SDA yang berbasis kelestarian, keadilan, dan keberlanjutan tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat lokal terhadap SDA di wilayah tempat tinggalnya.

Namun, rendahnya kesadaran masyarakat akan prinsip kelestarian dan keberlanjutan seringkali mendorong pemanfaatan SDA secara berlebihan.

Sebagai contohnya adalah terjadinya *over-fishing*, penggunaan alat tangkap

⁴⁸ Rivaldo D. Patty, "Mengenal Konservasi," *Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat*, diakses 22 September 2022, <https://bbksda-papuebarat.com/mengenal-konservasi/>.

⁴⁹ "Pertemuan XI Sumber Daya Alam," *SPADA Indonesia*, diakses 17 Juli 2023, https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/645554/mod_resource/content/1/Tata%20Kelola%20Sumber%20Daya%20Alam.pdf.

yang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Adapun, permasalahan lain seperti kerusakan terumbu karang dan mangrove⁵⁰ membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam di sekitarnya harus dibangun dengan fondasi yang kuat. Dibutuhkan penanganan yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap interaksi manusia dengan alam.

Dalam konteks konservasi di Papua Barat, pemanfaatan SDA yang mencakup hutan dan sumber daya perairan tidak bisa diberlakukan secara bebas dan terbuka. Pemanfaatan SDA ini dapat dilakukan secara kolektif, yaitu dengan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi yang dipegang oleh pemerintah atau suatu organisasi sebagai representasi dari masyarakat lokal untuk mengelola kawasan konservasi. Misalnya di Papua Barat, sejumlah kawasan konservasi berada di bawah kewenangan KKP dan sejumlah lainnya dikelola oleh KLHK.⁵¹ Output dari pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi ini adalah akses yang mudah bagi masyarakat lokal, baik dalam bentuk materiil ataupun kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi.⁵²

⁵⁰ Putu Oktavia, "Evolusi dan Tantangan *Governance* untuk *Common Property Resource*," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS*, Volume 1, No. 1 (Februari 2018): 35.

⁵¹ Sofyan Rahman, wawancara oleh peneliti, 17 November 2022.

⁵² Andika Lawasi, "Menakar Kedaulatan Rakyat dan Dominasi Swasta terhadap Sumber Daya Hutan (Ulusan Singkat Bencana Asap)," *Kompasiana*, 4 Oktober, 2015, diakses 17 Juli 2023, [https://www.kompasiana.com/dika_forester/5611464b2d7a616e048b4567/menakar-kedaulatan-rakyat-dan-dominasi-swasta-terhadap-sumber-daya-hutan-ulasan-singkat-bencana-asap#:~:text=Common%20pool%20resources%20\(CPR\)%20dan,boleh%20dibagi%20kepada%20yang%20bukan](https://www.kompasiana.com/dika_forester/5611464b2d7a616e048b4567/menakar-kedaulatan-rakyat-dan-dominasi-swasta-terhadap-sumber-daya-hutan-ulasan-singkat-bencana-asap#:~:text=Common%20pool%20resources%20(CPR)%20dan,boleh%20dibagi%20kepada%20yang%20bukan).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian, peneliti menjabarkan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian dan tingkat analisis (*level of analysis*), tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dikarenakan penelitian ini membutuhkan penjelasan yang memerlukan data berupa kata-kata dan bahasa. Penelitian ini lebih menekankan penjelasan yang bersifat analisis deskriptif dan naratif dalam penyajian data-datanya. Untuk itulah jenis penelitian deskriptif dipilih supaya lebih mudah dalam memahami tindakan CI dalam melakukan konservasi lingkungan di Papua Barat.

Kemudian, pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena berfokus pada pemahaman yang mendalam, pengembangan teori, serta pendeskripsian kompleksitas dan realitas sosial. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan pada penelitian ini—yang mana pada penulisan skripsi ini mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan realitas yang terjadi, yaitu Strategi Lembaga *Conservation International* dalam Konservasi Lingkungan di Papua Barat Tahun 2017-2022.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi difokuskan pada Provinsi Papua Barat. Tetapi, peneliti tidak melakukan penelitian ke lapangan secara langsung. Peneliti melakukan penelitian melalui sumber-sumber internet. Peneliti mencari informasi seluas-luasnya terkait dengan topik penelitian. Peneliti juga melakukan penelitian dengan wawancara melalui sambungan telepon bersama dengan Ibu Meity Mongdong dari yayasan Konservasi Indonesia (KI) dan Bapak Artanto Palentek dari CI Program Papua Barat yang menjadi *key informan* (informan kunci) dalam penelitian ini. Lebih lanjut, peneliti juga melakukan wawancara secara daring melalui media *Zoom Meeting* bersama pihak dari BKKPN Kupang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan, tepatnya pada bulan September 2022 s/d Juni 2023.

C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis (*Level of Analysis*)

Subjek penelitian merupakan pokok atau pelaku yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah CI. Kemudian untuk menentukan level analisis yang dipakai dalam penelitian, Mochtar Mas'ood telah mengklasifikasikan tingkat analisis di dalam Ilmu HI menjadi 5 (lima) bagian, yaitu individu, kelompok/*group of individuals*, negara-bangsa/*nation-state*, pengelompokan

negara-negara dalam suatu regional, dan sistem internasional.⁵³ Penelitian ini menggunakan tingkat analisis kelompok. Hal ini lantaran penelitian berfokus pada perilaku unit analisis kelompok INGO, yaitu CI.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini terdapat sejumlah tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tahapan-tahap penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut.

1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini, diawali dengan melakukan pencarian tema, topik, dan judul. Dalam prosesnya, peneliti mencari sesuatu yang menarik dan dianggap mampu untuk dikuasai oleh peneliti. Setelah itu, peneliti menentukan fokus penelitian pada peran yang dijalankan oleh CI dalam pengembangan ekowisata di Provinsi Papua Barat. Sehingga, peneliti melakukan pencarian di internet terkait dengan topik tersebut. Peneliti mencari berbagai sumber bacaan dan literatur seperti pada laman resmi CI ataupun pada laman berita yang tersebar luas di internet. Dari pencarian informasi tersebut kemudian didapatkan rumusan masalah penelitian ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dikumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti memanfaatkan sejumlah referensi yang berupa buku, artikel, laman resmi CI, laman berita, maupun sumber data lainnya. Referensi yang dimanfaatkan ialah sumber informasi

⁵³ Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 46.

yang valid dan kebenarannya bisa dijamin. Proses pengumpulan data dilakukan secara terus menerus dan bertahap hingga data yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data dikumpulkan dari berbagai sumber, peneliti membandingkan keabsahan berbagai data yang diperoleh tersebut. Sehingga pada saat analisis data dilakukan, didapatkan data yang lebih valid, seperti data-data terkait strategi yang dipersiapkan oleh CI dalam konservasi lingkungan di Papua Barat tahun 2017-2022 serta hubungan kemitraan CI dengan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kemudian pada proses analisis, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep sebagai alat bantu dalam menambah pemahaman terkait dengan topik penelitian hingga menemukan jawaban atas rumusan masalah.

4. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Dalam tahap ini, peneliti melakukan penyusunan pelaporan penelitian sebagai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil akhir yang ditulis pada laporan skripsi meliputi berbagai hasil pengamatan dan analisis terhadap data-data yang diperoleh. Penulisan laporan skripsi termasuk juga penarikan kesimpulan atas hasil yang didapatkan dari proses analisis data. Adapun dalam proses penulisan laporan, peneliti didampingi oleh dosen pembimbing untuk mendapatkan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data-data primer dan data-data sekunder. Peneliti menggali data primer yang diperoleh dengan wawancara melalui sambungan telepon bersama Ibu Meity Mongdong dari yayasan KI. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak KI sebagai narasumber lantaran KI merupakan yayasan nasional yang melanjutkan rekam jejak CI yang secara resmi menutup operasional programnya di Indonesia pada bulan April 2022.⁵⁴ Lebih lanjut, peneliti juga melakukan wawancara secara daring melalui media *Zoom Meeting* bersama pihak dari BKKPN Kupang. Pada teknik wawancara, peneliti secara eksploratif dan menyeluruh dalam mendapatkan informasi terkait strategi CI dalam konservasi lingkungan di Papua Barat 2017-2022. Wawancara ini juga dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal terkait aktivitas yang berhubungan dengan strategi lembaga CI dalam konservasi lingkungan di Papua Barat tahun 2017-2022, seperti pada strategi yang dipersiapkan serta hubungan kemitraan CI dengan pemerintah Provinsi Papua Barat. Adapun dengan teknik wawancara, data-data yang diperoleh dapat lebih dipercaya karena sumbernya dari pihak yang terkait.

Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data sekunder yang dimanfaatkan pada penyusunan penelitian ini, yaitu dengan melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka memanfaatkan sejumlah referensi yang telah dipaparkan pada subbab tinjauan pustaka. Kajian pustaka juga memanfaatkan

⁵⁴ "Sejarah Kami," *Konservasi Indonesia*, diakses pada 31 Januari 2023, <https://www.konservasi-id.org/sejarah-kami>.

sumber lain berupa buku, artikel, laman resmi pemerintah, laman resmi INGO, dan laman berita yang telah terpublikasi di internet. *Internet searching* digunakan sebagai sebuah metode mengumpulkan informasi dengan kajian pustaka. Hal ini dikarenakan pada internet ada berbagai informasi yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Berbagai informasi yang ada di internet tentunya sangat berguna dalam merampungkan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah tahapan mengolah informasi ke dalam sebuah perencanaan, sehingga dapat ditemukan penjabaran mendasar dari topik yang diangkat serta dapat memunculkan hipotesis yang sesuai dengan topik penelitian. Pada penulisan skripsi ini, peneliti menganalisis data menggunakan analisis deskriptif. Hal ini bertujuan untuk bisa menyajikan hasil penelitian secara sistematis, konkret, serta utuh dan menyeluruh tentang topik yang diteliti. Kemudian, sebagai alat bantu dalam menganalisis data digunakan konsep WCS. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan yang dijabarkan seperti berikut ini.

1. Reduksi Data

Melakukan reduksi data hal ini bermakna melakukan perangkuman terhadap informasi-informasi yang telah dikumpulkan, memilih hal-hal yang menjadi inti topik, konsentrasi pada hal-hal yang utama, mencari

tema dan skemanya.⁵⁵ Reduksi data dalam penelitian ini yakni informasi yang sudah didapatkan melalui studi dokumen dan wawancara yang berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah teknik reduksi data telah diselesaikan kemudian Langkah berikutnya ialah penyajian data atau informasi. Penyajian data pada penelitian ini disusun berupa uraian teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data yang berupa teks maka pembahasan lebih mudah untuk dipahami.

3. Pengambilan kesimpulan

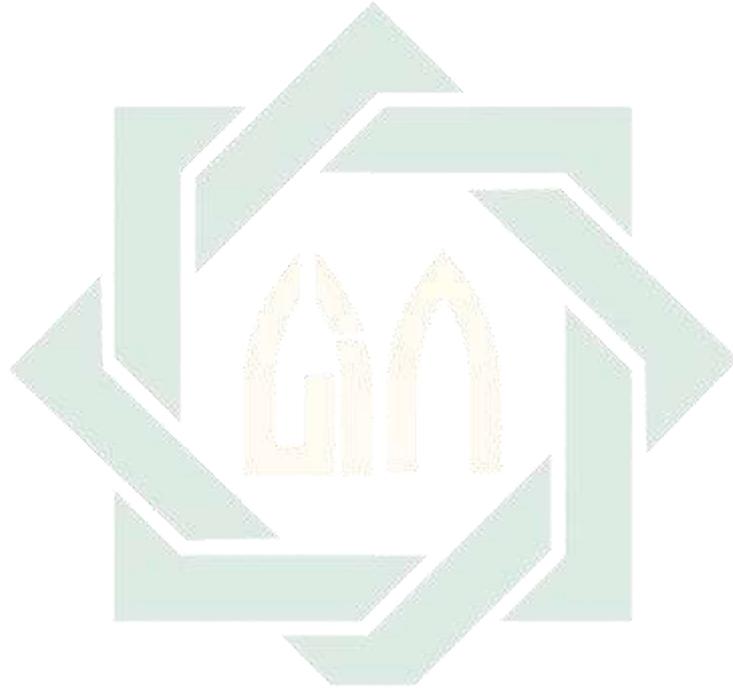
Pengambilan kesimpulan atau verifikasi dikemukakan setelah kedua teknik analisis yang sudah disebutkan rampung. Kesimpulan dapat memuat deskripsi mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sedari awal.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Melakukan pemeriksaan data dilaksanakan untuk menunjukkan apakah hasil penelitian yang didapat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Agar data yang ada pada penelitian kualitatif bisa dijamin pertanggungjawabannya sebagai penelitian ilmiah wajib dilaksanakan pengujian keabsahan data. Pada metode pemeriksaan keabsahan data penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi data dengan cara memeriksa keabsahan data menggunakan berbagai sumber data lainnya. Selain itu,

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 246.

pemeriksaan keabsahan data juga dilakukan dengan diskusi dengan pihak-pihak terkait yang menguasai atau memiliki keahlian/wawasan terkait dengan topik penelitian ini, salah satunya adalah dosen pembimbing.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab penyajian dan analisis data, peneliti menjelaskan sejarah hadirnya *Conservation International* (CI) di Indonesia, khususnya di Papua Barat. Kemudian terdapat pembahasan mengenai strategi pengelolaannya oleh CI. Adapun penjabarannya terbagi ke dalam 2 (dua) subbab, yaitu Sejarah *Conservation International* di Papua Barat dan Strategi *Conservation International* dalam Konservasi Lingkungan di Papua Barat Tahun 2017-2022.

A. Sejarah *Conservation International* di Papua Barat

Conservation International (CI) merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang konservasi lingkungan hidup. CI mulai berdiri pada tahun 1987 dan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Sejak awal dibentuk, kerja CI berfokus pada pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati dengan menggabungkan kerja lapangan, ilmu pengetahuan, dan kemitraan yang kuat.⁵⁶ Tujuannya adalah untuk melindungi manfaat penting SDA, seperti flora, fauna, air dan udara yang bersih, ketersediaan sumber pangan yang cukup dan bergizi, serta sumber mata pencarian masyarakat sekitar.

Pada tahun 1991, CI melihat Indonesia sebagai negara yang sangat kaya keanekaragaman hayatinya. Sebagai NGO asing, tentunya CI bekerja sama

⁵⁶ "About Conservation International: Fighting to protect nature for people," *Conservation International*, diakses 13 April 2023, <https://www.conservation.org/about>.

dengan pemerintah Indonesia melalui departemen kehutanan (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia). Pada zaman itu, semua pekerjaan konservasi laut maupun darat ada di bawah kewenangan departemen kehutanan.⁵⁷ CI kemudian membagi wilayah kerjanya menjadi 4 (empat) kawasan konservasi yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali, dan Papua Barat.⁵⁸

Di Provinsi Sumatera Utara, CI bekerja di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal dengan fokus untuk menjaga fungsi ekologi dengan meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial, memperkuat tata kelola pemanfaatan ruang, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan bersama pemerintah. Kemudian, di Provinsi Jawa Barat CI bekerja untuk mendukung pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango yang merupakan penyedia air bersih bagi 30 juta masyarakat di Jawa Barat dan sekitarnya. CI berfokus pada TN Gunung Gede Pangrango untuk menjaga hutan yang menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.⁵⁹ Di Provinsi Bali, terdapat beberapa fokus kegiatan yang dijalankan oleh CI, salah satunya adalah bekerja bersama pemerintah di desa-desa di KKP dengan pembangunan SIDESI (Sistem Informasi Desa Konservasi) sesuai mandat Peraturan Desa (Perdes) tentang Zonasi Pesisir Nomor 7 tahun 2017 serta pemetaan partisipatif dan berkembang hingga penyusunan Perdes dan penyusunan anggaran program

⁵⁷ Meity Mongdong, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2023.

⁵⁸ Timothy Febrian Theodorus, Aswin Baharuddin, & Bama Andika Putra, "Peran *Conservation International* (CI) terhadap Konservasi Perairan di Bali (Studi Kasus: Desa Tulamben, Bali)," *Hasanuddin Journal of International Affairs Volume 1*, No 2 (Agustus 2021): 155.

⁵⁹ "Lokasi Kerja Kami Sundaland," *Konservasi Indonesia*, diakses 8 Juni 2023, <https://www.konservasi-id.org/lokasi-kerja-2/sundaland>.

konservasi hingga tahun 2020.⁶⁰ Hal penting lain yang dikerjakan oleh CI di Bali adalah membimbing komunitas anak muda *Youth Conservation Initiative* (YCI) yang terlibat aktif dalam meningkatkan kapasitas bidang konservasi, memulai inisiatif perlindungan dan pemulihan populasi Jalak Tunggir Abu (*Acridotheres melanopterus tertius*) di Kuta Selatan, dan mengembangkan pelestarian ombak dan pesisir yang merupakan salah satu kawasan wisata selancar terbaik dunia.⁶¹

Sementara di Provinsi Papua Barat, CI bekerja bersama-sama dengan pemerintah, akademisi dan institusi pendidikan lokal, mitra-mitra non-pemerintah, dan masyarakat lokal di Provinsi Papua Barat dalam mengelola SDA hayati melalui pendekatan bentang alam yang terintegrasi dan memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat lokal serta mendorong penerapan prinsip-prinsip yang berkelanjutan (*sustainable*) untuk pariwisata di Papua Barat. Pendekatan ini tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan inisiatif Papua Barat sebagai “Provinsi Pembangunan Berkelanjutan”⁶² dengan didasarkan pada kegiatan konservasi. Keseriusan CI dalam mendorong inisiatif ini di Papua Barat diawali dengan adanya program *terrestrial* di hutan Mamberamo dan penyusunan *Marine Rapid Assessment Program* (MRAP). Penjelasan lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut.

⁶⁰ “Pemetaan Partisipatif 3 Desa SIDESI Tulamben, Bunutan, Bugbug,” *Nyegara Gunung*, 7 Juli, 2017, diakses pada 8 Juni 2023, <https://nyegaragunung.net/id/pemetaan-partisipatif-3-desa-sidesi-tulamben-bunutan-bugbug/>.

⁶¹ “Lokasi Kerja Kami Sunda Banda,” *Konservasi Indonesia*, diakses 8 Juni 2023, <https://www.konservasi-id.org/lokasi-kerja-2/sunda-banda>.

⁶² “Lokasi Kerja Kami Sahul Papua,” *Konservasi Indonesia*, diakses 8 Juni 2023, <https://www.konservasi-id.org/lokasi-kerja-2/sahul-papua>.

kelelawar yang mengonsumsi buah, 2 (dua) spesies kelelawar yang mengonsumsi nektar, dan 7 (tujuh) spesies kelelawar pemakan serangga. Dan dari kelompok hewan pengerat terdapat sebanyak 10 spesies meliputi tikus rumput, tikus pohon, dan *semi aquatic*.⁶⁵

Tidak cukup dengan keanekaragaman faunanya saja, hutan Mamberamo juga memiliki potensi flora yang tidak kalah menakjubkan. Pulau Papua memiliki keanekaragaman tanaman tertinggi dari sejumlah pulau yang ada di Indonesia, bahkan secara global. Pulau Papua memiliki sekitar 3 (tiga) kali lebih banyak dari total spesies tanaman yang berpembuluh di Pulau Jawa yang hanya terdapat 4.598 spesies di dalamnya.⁶⁶ Di Papua ditemukan sebanyak 13.634 spesies tanaman dari 1.742 genus dan 264 famili. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68 % atau 9.301 spesies merupakan tanaman endemik di Pulau Papua. Hal ini berarti bahwa lebih dari dua pertiga tanaman yang tumbuh di wilayah ini tidak bisa ditemukan di wilayah lain.⁶⁷

Sejalan dengan integrasi pelaksanaan konservasi dan pembangunan, CI ingin mengetahui apa saja yang dapat dijadikan sebagai prioritas konservasi. Dari program ini, CI juga ingin mengetahui pengetahuan dan persepsi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan

⁶⁵ Aksamina Yohanita, Kris Helgen, dan Yance de Fretes, "Survei of Mamalia in Mamberamo-Foya Area (A mamalian survey at Mamberamo-Foya)," *Natural*, Vol 6 No. 1 (April 2007): 14.

⁶⁶ Antonius Purwanto, "Keanekaragaman Hayati di Bumi Papua: Potret, Tantangan, dan Upaya Pengelolaan," *Harian Kompas*, 21 Februari, 2022, diakses 13 April 2023, https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/02/21/keanekaragaman-hayati-di-bumi-papua-potret-tantangan-dan-upaya-pengelolaan?utm_source=kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sharinglink.

⁶⁷ Rodrigo Cámara-Leret, dkk., "New Guinea has the world's richest island flora," *Nature* 584 (2020): 579–583, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2549-5>.

pada setiap lokasinya. Pengukuran dilakukan dengan melihat hal-hal yang dapat mengancam keanekaragaman hayati yang ada di lokasi tersebut. Selain itu, dari kegiatan perikanan karang juga dilakukan pengamatan dan pengambilan data.

Dari pengamatan tersebut dihasilkan data yang menunjukkan bahwa terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat mempunyai keberagaman hayati yang tinggi dan dapat dikatakan dalam keadaan fisik yang baik. Akan tetapi, terdapat sejumlah ciri rusaknya pada terumbu karang yang cukup dikhawatirkan, khususnya dikarenakan oleh praktik *illegal fishing*. Secara detail, catatan hasil dari survei ini adalah sebagai berikut.

- a. Terumbu karang: tercatat sebanyak 456 spesies karang keras. Jumlah ini merupakan angka yang mengembirakan, pasalnya angka ini menunjukkan separuh lebih dari seluruh jumlah karang yang ada di dunia. Hal ini menjadi keunikan tersendiri di mana tidak ada satu tempat pun, dengan luas area yang sama, memiliki jumlah spesies sebanyak ini.
- b. Moluska: Keragamannya dapat digolongkan dalam jumlah spesies yang tinggi di angka 699 spesies. Jumlah ini di atas semua hasil survei *Rapid Assessment Program* (RAP) yang pernah dilakukan sebelumnya di sekitar kawasan tersebut, seperti pada RAP wilayah Papua Nugini dan Filipina.

- c. Ikan karang: ditemukan sebanyak 828 spesies. Penemuan ini meningkatkan jumlah total spesies ikan yang diketahui di kepulauan ini, dari yang sebelumnya hanya diketahui sebanyak 144 spesies menjadi 972 spesies. Namun, pengamat juga masih memperkirakan bahwa setidaknya paling sedikit terdapat 1.084 spesies ikan karang yang berada di wilayah ini.
- d. Perikanan karang: sejumlah 196 spesies, yang berasal dari 59 genus dan 19 famili yang dikategorikan sebagai spesies ikan konsumsi. Total biomasa untuk lokasi-lokasi di Kepulauan Raja Ampat jauh lebih besar dibandingkan lokasi-lokasi lain di kawasan *the Coral Triangle*, termasuk Provinsi Milne Bay (Papua Nugini), Kepulauan Togean-Banggai (Indonesia), dan kepulauan Calamianes (Filipina).
- e. Kondisi karang: dinilai sesuai dengan Indeks Kondisi Karang CI, dapat dipahami bahwa 60 % dari keseluruhan terumbu karang yang disurvei dalam kondisi yang sangat baik. Lokasi-lokasi tersebut memiliki kombinasi keragaman karang dan ikan yang terbaik, bebas dari gangguan dan penyakit. Sebaliknya, 17 % terumbu karang masuk ke dalam kategori yang buruk. Namun, persentase ini terbatas pada area teluk yang tersembunyi dengan tingkat pengendapan lumpur yang tinggi.⁷⁰

⁷⁰ Sheila A. McKenna, Gerald R. Allen, & Suer Suryadi (ed.), *A Marine Rapid Assessment of the Raja Ampat Island, Papua Province Indonesia. RAP Bulletin of Biological Assessment 22. Conservation International*, Washington, DC, 2002, 9-10.

Dari hasil penemuan daftar spesies, yang berperan sebagai parameter dalam melihat keberagaman hayati secara menyeluruh, kemudian disusunlah laporan MRAP yang menjabarkan capaian pengukuran lapangan area Kepulauan Raja Ampat, Indonesia. Laporan ini digunakan sebagai sarana dalam membagikan informasi terkait keberagaman hayati pada daerah laut dan pesisir untuk konservasi. Berdasarkan laporan ini, CI sebagai NGO yang bergerak di bidang konservasi membuat rekomendasi prioritas pengelolaan kawasan konservasi dan menentukan bagaimana arah konservasi ke depannya di wilayah Papua Barat.

Setelah 3 (tiga) tahun berlalu sejak kedatangan CI di Papua Barat pada tahun 1998 dalam program *terrestrial* dan penyusunan MRAP, CI kemudian sangat serius dalam mengerjakan konservasi di Provinsi Papua Barat. Seluruh potensi yang ada di dalamnya membuat CI merasa penting sekali untuk mengelola kawasan ini. Dan dengan demikian, CI akhirnya membangun beberapa kantor lapangan di wilayah kerjanya, Papua Barat. Terdapat 5 (lima) kantor yang tersebar di Papua Barat, yaitu di Manokwari, Fakfak, Kaimana, Waisai, dan Sorong.⁷¹

B. Strategi *Conservation International* dalam Konservasi Lingkungan di Papua Barat Tahun 2017-2022

Dalam *The World Conservation Strategy* telah dipaparkan dalam bagian khusus terkait kerangka strategi pengelolaan sumber daya kawasan konservasi

⁷¹ Meity Mongdong, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2023.

Konservasi Indonesia, menuturkan bahwa pembangunan wilayah-wilayah baru di Papua Barat ada kalanya membawa dampak buruk yang cukup serius bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi wilayah perairan.⁷³ Untuk itu, adanya integrasi antara pembangunan dan pengelolaan pelestarian lingkungan sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai salah satu pelaku konservasi, CI tentunya memiliki strategi yang apik untuk mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan dan konservasi. Dalam hal ini, CI terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) terkait pembangunan berkelanjutan di Papua Barat dan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Pembahasan selengkapnya dipaparkan sebagai berikut.

a. Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat

Perdapus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat ialah Perda Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai Langkah pengaplikasian sejumlah pasal pasal khusus UU terkait otonomi khusus bagi P rovinsi Papua dan Papua Barat. Perdapus tersebut memiliki level yang sama dengan Perda lainnya sebagaimana produk hukum yang berlaku secara umum di pemerintahan daerah di Indonesia. Menariknya adalah tahapan pembentukan Perda ini berbeda dengan pembentukan Perda pada

⁷³ Meity Mongdong, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2023.

umumnya.⁷⁴ Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat tidak sekadar berkonsentrasi pada pemeliharaan lingkungan saja, tetapi juga memberikan hak dan menjamin kesejahteraan masyarakat adat yang berada di Papua Barat. Masyarakat adat yang dimaksud tersebut terbagi ke dalam 7 (tujuh) wilayah adat budaya yang tersebar di seluruh Tanah Papua dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Wilayah adat budaya Tabi atau Mamta: meliputi suku-suku adat yang mendiami daratan di sepanjang Sungai Mamberamo hingga Sungai Tami.
- 2) Wilayah adat budaya Saireri: meliputi suku-suku adat yang mendiami wilayah Teluk Saireri.
- 3) Wilayah adat budaya Doberay: meliputi suku-suku adat yang mendiami kawasan di sekitar BLKB.
- 4) Wilayah adat budaya Bomberai: meliputi suku-suku adat yang mendiami daerah Teluk Bituni sampai ke Mimika.
- 5) Wilayah adat budaya Anim Ha: meliputi suku-suku adat yang mendiami daerah Asmat hingga ke kampung di dekat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berbatasan dengan Papua Nugini, yaitu kampung Kondo, Kabupaten Merauke.

⁷⁴ Subbagian Hukum BPK Provinsi Papua Barat, "Perdasus Pembangunan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua," *Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat*, diakses 19 Mei 2023, https://papuabarot.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Perdasus-SDGs-utk-Kesejahteraan-Masy-Papua_NET-CATBER.pdf.

- 6) Wilayah adat budaya La Pago atau Lano Pago: meliputi suku-suku adat yang mendiami dataran tinggi Pegunungan Tengah bagian timur.
- 7) Wilayah adat budaya Me Pago: meliputi suku-suku adat yang mendiami kawasan Pegunungan Tengah bagian barat.⁷⁵

Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan bagi kelangsungan kelestarian alam di Provinsi Papua Barat, tetapi kesejahteraan masyarakat adat juga harus dipastikan. Maka dari itu, pembangunan berkelanjutan menjadi satu jalan terang bagi target yang ingin dicapai ini. Direktur Jenderal Konservasi SDA dan Ekosistem KLHK, Wiratno, dalam Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif/*International Conference on Biodiversity, Eco-Tourism and Creative Economy* (ICBE) dengan sangat optimis menyatakan, “Papua akan wariskan hutan ini hingga seribu tahun.”⁷⁶ Sehingga, nantinya kelestarian hutan masih terjaga seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Jadi melalui Perdasus ini, diharapkan dapat menjadi pacu percepatan pembangunan di Tanah Papua, di samping menjaga kelestarian alam guna kesejahteraan hidup masyarakat adat.

⁷⁵ Andreas Jefri Deda dan Suriel Samuel Mofu, “Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai Orang Asli Papua Ditinjau dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian,” *Jurnal Administrasi Publik Volume 11* Nomor 2 (Oktober 2015): 15.

⁷⁶ Subbagian Hukum BPK Provinsi Papua Barat, “Perdasus Pembangunan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua,” *Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat*, diakses 19 Mei 2023, https://papuabarat.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Perdasus-SDGs-utk-Kesejahteraan-Masy-Papua_NET-CATBER.pdf.

Sebelum disahkannya Perdasus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat memang belum ada perlindungan yang kuat terkait pembangunan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan yang merusak lingkungan juga menjadi dampak dari tidak adanya sumber hukum yang mengatur tentang bagaimana mengelola ataupun mengambil sumber daya yang ada di wilayah kawasan konservasi. Untuk itu, CI mendorong supaya pemerintah membuat perlindungan penuh terkait pembangunan berkelanjutan. CI mempunyai hubungan kerja sama yang kuat dengan pemerintah, sehingga peraturan-peraturan itu dapat dikerjakan dengan mudah dan pada akhirnya bisa disahkan sebagai peraturan yang mengatur jalannya kegiatan pembangunan yang tetap didasarkan pada konservasi. CI berupaya agar peraturan-peraturan tentang pembangunan berkelanjutan muncul. Membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah merupakan pendekatan yang dilakukan oleh CI, karena pembentukan peraturan-peraturan tersebut juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan daerah.⁷⁷ Pembentukan peraturan daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.⁷⁸

Dalam upaya penyebarluasan Perdasus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat, CI menunjukkan

⁷⁷ Meity Mongdong, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2023.

⁷⁸ Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus.

dukungan penuh melalui lokakarya yang diselenggarakan CI bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kabupaten Sorong. Acara lokakarya yang digelar tersebut merupakan salah satu bagian dari angeda kampanye yang menunjukkan provinsi Papua Barat selaku provinsi konservasi. CI mendampingi komitmen pemerintah dengan sangat baik. Sebagai sebuah lembaga yang bekerja berdasarkan basis ilmiah dan mengedepankan hubungan kerja berbasis kemitraan, CI sangat bersedia untuk memfasilitasi berbagai keperluan untuk mendukung komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat.⁷⁹

b. Pembangunan Ekonomi Kawasan Konservasi melalui Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata dinilai menjadi salah satu faktor pendukung utama bagi peningkatan angka perekonomian suatu kawasan. Namun, kegiatan pariwisata konvensional sudah terbukti banyak menimbulkan dampak buruk berupa kerusakan lingkungan, masuknya pengaruh yang tidak terkontrol pada budaya lokal, hingga berkurangnya peran masyarakat setempat pada aspek usaha, lingkungan, budaya, dan perekonomiannya. Hal ini pun sudah menyita perhatian para ahli lingkungan, budayawan, tokoh masyarakat, dan pelaku bisnis di sekitar

⁷⁹ MC Kab Raja Ampat, "DPRD Komitmen Sahkan Perdasus Pembangunan Berkelanjutan Papua Barat," *InfoPublik*, 23 Oktober, 2018, diakses pada 14 Juni 2023, <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/305817/dprd-komitmen-sahkan-perdasus-pembangunan-berkelanjutan-papua-barat>.

dengan hal tersebut, CI dan pemerintah mendorong adanya tarif masuk. Jadi, semua turis yang masuk ke kawasan-kawasan pariwisata yang berbasis konservasi itu dikenakan tarif masuk. Selama pengunjung terus berdatangan, otomatis tarif masuk yang terbayar terus ada.⁸³ Ini yang menjadi salah satu daya dukung pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

Tidak hanya menarik bagi para wisatawan, tetapi kegiatan pariwisata berbasis konservasi juga menarik bagi para investor dan institusi dana hibah (*trust fund*). Mereka berani untuk investasi maupun memberikan dana karena ada jaminan bahwa sumber daya yang ada di kawasan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Pada saat sumber daya yang ada tersebut terjaga, nilai jual sektor pariwisata juga tetap terjaga. Sehingga para investor dan *trust fund* dapat memberikan kesepakatan yang bagus untuk pengelolaan kawasan konservasi ke depannya. Salah satu *trust fund* yang turut berpartisipasi dalam pendanaan kawasan konservasi di Papua Barat (yaitu BLKB) adalah *Blue Abadi Fund* (BAF). BAF adalah dana hibah khusus untuk konservasi di kawasan BLKB yang disalurkan kepada berbagai organisasi (salah satunya adalah CI) maupun masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. BAF menyediakan pendanaan jangka panjang yang aman dan stabil untuk menjamin kelestarian ekosistem BLKB dan seluruh spesies yang ada

⁸³ Meity Mongdong, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2023.

di dalamnya melalui kegiatan perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan yang dijalankan oleh institusi-institusi yang berada di kawasan konservasi tersebut. Sehingga, hal ini juga membawa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat lokal.⁸⁴

Guna keberlanjutan pembangunan yang berbasis SDA, baik pemerintah, LSM, maupun masyarakat dapat terlibat langsung dalam sektor pariwisata yang membawa dampak pertumbuhan perekonomian lokal. Misalnya dari sisi *employment*, para pengelola sektor wisata merekrut dan mempekerjakan orang lokal. Kemudian pertumbuhan ekonomi dibuat lagi dari pembelanjaan sektor pariwisata ini kepada masyarakat. Bahan-bahan dari masyarakat bisa dibeli untuk dijadikan sumber makanan, baju-baju pengunjung yang dijahit langsung oleh SDM lokal, kemudian sewa-menyewa transportasi, dan lain-lainnya. Terdapat juga masyarakat yang membangun *homestay* dan menjadi pemilik dari usaha pariwisata. Kemudian masyarakat di kampung yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata bisa menjual suvenir, bisa menjual hasil-hasil kebunnya kepada operator, kapal, resor, atau *homestay*.⁸⁵

Di sinilah CI melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan arahan terkait bagaimana menjaga alam dengan baik supaya peningkatan ekonomi dari bidang pariwisata dapat

⁸⁴ “Tentang *Blue Abadi Fund*,” *Blue Abadi Fund*, <https://blueabadifund.org/tentang-kami/>, diakses 22 Mei 2023.

⁸⁵ Meity Mongdong, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2023.

dicapai secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi secara daring dengan tema “Mari Bicara Taman Pesisir Fakfak” pada hari Rabu, 3 Februari 2021, CI ingin masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan konservasi.⁸⁶ CI mencoba untuk memberikan edukasi tentang menjaga manfaat penting alam dan mengubah gaya hidup masyarakat yang berpotensi untuk mengeksploitasi SDA, baik di wilayah perairan maupun di darat. CI memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana menjaga biota laut dan terumbu karang, penanaman mangrove di daerah sekitar pantai, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan pengembangan potensi kawasan konservasi.⁸⁷ Dalam hal ini, CI bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Raja Ampat guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan ekonomi masyarakat.⁸⁸ Dengan kondisi alam yang terjaga dengan baik, hal tersebut justru membawa dampak yang positif bagi terbukanya peluang peningkatan ekonomi dengan membuka usaha di sektor pariwisata.

⁸⁶ Ernes Broning Kakisina, “Kabupaten Fakfak Sosialisasikan Potensi Kawasan Konservasi Taman Pesisir,” *Antara*, 3 Februari, 2021, diakses pada 14 Juni 2023, <https://papuabarat.antaranews.com/berita/10479/kabupaten-fakfak-sosialisasikan-potensi-kawasan-konservasi-taman-pesisir>.

⁸⁷ Nur Aini, Arif Satria, & Ekawati Sri Wahyuni, “Mekanisme Akses dan Kekuasaan dalam Memperkuat Kinerja Institusi Pengelolaan Ekowisata Bahari (Studi Kasus: Kampung Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat),” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* (2019): 65-77.

⁸⁸ Selna Adesetiani, Lala M. Kolopaking, & Eriyatno, “Strategi Pengembangan Usaha Wisata *Homestay* Berbasis Komunitas di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat,” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 09* (03) (2021), <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/36386>.

Peningkatan ekonomi yang datang dari sektor pariwisata yang bertumbuh pesat mengundang banyak perhatian pemerintah. Hal ini merupakan perkembangan yang positif. Salah satu contohnya dapat dilihat dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada. Ibu Meity Mongdong dalam wawancara bersama peneliti menceritakan pengalamannya ketika CI datang ke Papua Barat 20 tahun yang lalu untuk memulai program kerjanya. Pada saat itu hanya ada 1 (satu) transportasi publik dengan 1 (satu) rute, misalnya dari Kabupaten Sorong ke Waisai. Sangat berbeda dengan masa sekarang yang kapal-kapal publik sudah banyak tersebar di Papua Barat dan telah terjangkau oleh fasilitas perhubungan. Selain itu pemerintah juga memastikan penyediaan jaringan komunikasi menjadi sangat lancar. Hal tersebut juga otomatis membantu masyarakat karena mereka punya akses kepada pasar global dan pasar *online* untuk menjual barang-barang lokal, termasuk mempromosikan pariwisata yang mereka kelola. Jadi benefit dari *multiple economic effect* itu juga dirasakan langsung oleh masyarakat.⁸⁹

Lebih jauh, CI juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mendukung pembangunan industri pariwisata berkelanjutan melalui penentuan daya dukung (*carrying capacity*) setiap destinasi pariwisata melalui pengumpulan data dan pengukuran parameter di lapangan secara langsung. Dalam melakukan kajian

⁸⁹ Meity Mongdong, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2023.

perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2017 lalu oleh 2 (dua) pihak, yaitu Ikram Malan Sangadji selaku Kepala BKKPN dan Ketut Sarjana Putra yang menjabat sebagai *Vice President* CI Indonesia. Kerja sama yang dilakukan bersama CI berfokus pada sumber daya hayati kawasan konservasi dan penguatan kelembagaan pengelola.⁹¹

Dalam perjanjian kerja sama dengan Balai KKPN Kupang, CI memiliki hak dan kewajiban. Beberapa peran CI dalam kerja sama antara lain:

- a. mendampingi Balai KKPN Kupang dalam upaya perlindungan sumber daya kawasan konservasi dengan menyediakan ahli lokal maupun internasional yang memiliki kapasitas ilmiah sesuai kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi;
- b. memberikan data dan informasi masukan bagi Balai KKPN Kupang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat;
- c. mendukung Balai KKPN Kupang dalam meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi melalui pendidikan dan penyadartahuan konservasi ke masyarakat;
- d. mendampingi Balai KKPN Kupang dalam meningkatkan profil dan isu-isu kunci perlindungan sumber daya hayati kelautan dan perikanan;

⁹¹ Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan *Conservation International Foundation* tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Keunikan pendekatan kepada masyarakat lokal oleh CI di Papua Barat menggunakan pendekatan *community based*. Contohnya, CI membuat *capacity building* kepada begitu banyak anggota masyarakat, pemuda-pemuda dari kampung-kampung yang notabene dari sisi latar belakang pendidikan bisa dibilang kurang dan ala kadarnya tetapi punya ketertarikan yang tinggi kepada kawasan konservasi yang berada di wilayah tempat tinggalnya, kepada sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga ketergantungan kepada SDA sudah pasti tinggi. Jadi, CI memberikan mereka kapasitas dan kemudian merekrut mereka sebagai staf CI, dengan maksud untuk membuat pelatihan serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Sambil bekerja, masyarakat lokal yang terlibat dilatih untuk mengelola kawasan konservasi secara langsung.⁹⁴

Dari situ, kemudian masyarakat lokal yang terlibat ditransfer ke dalam 1 (satu) badan kolaborasi pemerintahan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola KKP di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat. Dengan adanya status BLUD ini yang memungkinkan orang-orang dari non-pemerintahan (*non-government people*) dapat bekerja bersama. Kemudian masyarakat lokal tersebut berpeluang besar menjadi staf UPTD untuk mengelola kawasan konservasi. Hingga saat ini, kawasan konservasi perairan di Papua Barat hanya dikelola oleh 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang pegawai negeri. Sisanya, lebih dari 100 orang, semuanya adalah

⁹⁴ Meity Mongdong, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2023.

masyarakat lokal yang kemudian sudah tersertifikasi menduduki jabatan-jabatan tertentu di dalam badan ini. Pada umumnya tugas-tugas masyarakat lokal adalah membuat manajemen harian (*daily management*) di lapangan terhadap kawasan konservasi.⁹⁵

Selain bekerja bersama masyarakat, CI terlebih dahulu memberikan berbagai penyuluhan dan penyadartahuan konservasi kepada masyarakat tentang bagaimana menjalani hidup dengan tetap memperhatikan kondisi alam supaya tetap terjaga. CI harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat. Pasalnya, terdapat sejumlah penolakan oleh masyarakat terhadap hadirnya pihak asing. Salah satu contohnya adalah peristiwa penolakan yang dialami CI di Pulau Venu, Kaimana. Pulau Venu merupakan pulau kecil yang terletak di selatan Kabupaten Buruway yang luasnya hanya sekitar 15 hektare. Pulau ini memiliki pantai pasir putih dan terumbu karang yang indah. Tetapi, pulau ini memiliki potensi untuk dikucilkan oleh masyarakat adat setempat dan mengalami kerusakan lingkungan yang parah. Penolakan ini merupakan akibat dari kesalahan dalam mendekati masyarakat adat setempat, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi tentang konservasi itu sendiri antara CI dan masyarakat adat setempat. Untuk itu, CI melakukan komunikasi yang intens dengan masyarakat adat setempat dengan mengedepankan aspek sosial budaya dalam menginformasikan

⁹⁵ Ibid.

konsep konservasi yang dilakukan di Pulau Venu untuk mendapat dukungan dari masyarakat.⁹⁶

Saling memahami antara CI dan masyarakat lokal sangatlah penting untuk keberlanjutan pengelolaan SDA. Dari pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh CI, masyarakat juga memahami perihal konservasi dengan baik. Ketika kesadaran masyarakat lokal terkait konservasi telah tertanam, masyarakat bisa turut terlibat secara langsung sebagai salah satu pelaku konservasi. Sehingga, inovasi-inovasi dari masyarakat dapat juga diaplikasikan pada kegiatan konservasi di lapangan. Dari sini dapat timbul solusi-solusi yang tidak terfikir oleh CI. Adanya perbedaan pandangan ini yang kemudian menjadikan kegiatan konservasi di Papua Barat semakin baik. Kemudian, pada saat masyarakat juga memperhatikan kontrol terhadap pemanfaatan SDA dapat dilihat bahwa CI telah berhasil untuk memengaruhi masyarakat dalam menerapkan strategi pencegahan. Hubungan antara masyarakat dengan ekosistem sekitarnya pada akhirnya dapat senantiasa terjaga. Kearifan masyarakat setempat juga dapat tetap menjadi dasar untuk mengalokasikan, mengakses, dan menguasai SDA di Papua Barat.

⁹⁶ Heru Ryanto Budiana, Priyo Subekti, & Dadang Sugiana, “*Environmental Communication in Kaimana Regency (Descriptive Study on Conservation International (CI) Environmental Communication Activity in the Water Conservation Area of Kaimana Regency)*” (proceedings of 1st workshop on Environmental Science, Society, and Technology, WESTECH 2018, Medan, Indonesia, 8 Desember 2018).

4. Strategi *Focus on Causes as well as Symptoms* melalui Kegiatan Pemantauan Kesehatan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Distrik Buruway

Papua Barat memiliki kekayaan terumbu karang yang tertinggi di dunia. Diidentifikasi bahwa sebanyak 75 % dari jumlah terumbu karang secara global terdapat di Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Raja Ampat. Sehingga, kawasan ini dikatakan sebagai jantung segitiga terumbu karang (*the heart of coral triangle*). Di wilayah tersebut ditemukan lebih dari 610 spesies terumbu karang yang jenisnya berbeda-beda.⁹⁷ Hal tersebutlah yang membuat CI sangat serius untuk mengerjakan konservasi perairan, salah satunya dengan program pemantauan (*monitoring*) kesehatan terumbu karang. Pemantauan kesehatan terumbu karang bertujuan untuk mengetahui segala perubahan yang terjadi di area tersebut. Hasil dari pemantauan ini kemudian dapat diketahui penyebab serta gejala dari setiap perubahan pada terumbu karang. Dengan teridentifikasinya penyebab serta gejala, CI dapat lebih mudah dalam menentukan tindakan yang harus diambil jika terdapat perubahan negatif untuk mengembalikan manfaat penting KKP.

Serangkaian aktivitas pemantauan kesehatan terumbu karang yang dilaksanakan oleh CI di Papua Barat telah dimulai sejak tahun 2009. Dan salah satu area yang menjadi fokus CI adalah KKP Daerah Distrik

⁹⁷ Meity Mongdong, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2023.

Buruway, Papua Barat.⁹⁸ Distrik Buruway berlokasi di BLKB bagian selatan, tepatnya berada di antara Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, dengan area seluas 232.062,54 hektare. Ekosistem terumbu karang di KKP ini sangat penting karena dapat mendukung kondisi perikanan termasuk keberadaan invertebrata, seperti teripang dan lola yang sangat penting bagi kebutuhan masyarakat lokal yang mendiami daerah di sekitar pesisir sebagai sumber makanan dan pendapatan. Hal ini didukung juga oleh data yang diperkirakan BPS Kabupaten Kaimana bahwa sebanyak lebih dari 64 % kehidupan masyarakat berhubungan langsung dan tergantung dengan sumber daya pesisir dan laut.⁹⁹

Kegiatan pemantauan kesehatan karang dilaksanakan secara teratur setiap 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun sekali. Pelaksanaan pemantauan yang terbaru dilaksanakan pada tahun 2019, tepatnya di tanggal 26 Maret - 4 April yang. Namun karena adanya kendala cuaca yang menyebabkan gelombang tinggi, kegiatan pemantauan ini hanya dilaksanakan di 22 lokasi KKP. Di beberapa lokasi, gelombang tinggi bisa mencapai ketinggian 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter. Hal ini yang membuat para tim pemantauan kesulitan untuk menuju ke lokasi dan mengambil data. Selain itu, kendala dari kegiatan pemantauan juga datang dari adanya petuanan.

⁹⁸ Irman Rumengan, dkk., “*Monitoring Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring) di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana Distrik Buruway, Papua Barat,*” *Bird’s Head Seascope*, Januari – Maret, 2019, 1, https://birdsheadseascope.com/download/indonesian%20publications/CoE_Newsletter_Jan-March_2019.pdf (diakses 4 Juni 2023).

⁹⁹ Purwanto, dkk., *Laporan Status dan Tren Ekologi KKPD Buruway, Kaimana Universitas Papua, The Nature Conservancy, Conservation International, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Manokwari, Sorong, Indonesia.*

Petuanan mewajibkan adanya ijin aktivitas dengan membayar beberapa rupiah. Dikarenakan belum adanya sosialisasi dengan baik dan tidak terdapat peraturan yang sah, ini membuat tim pemantauan terkendala dalam menyelesaikan pemantauan dan pengambilan data dengan tepat waktu.¹⁰⁰

Kegiatan pemantauan kemudian dilanjutkan pada tanggal 24 – 25 November 2019, pemantauan dilaksanakan di 6 (enam) lokasi lainnya. Selama pemantauan ini, CI bekerja sama dalam 1 (satu) tim dengan melibatkan berbagai mitra dari instansi pemerintahan, masyarakat lokal, LSM, hingga lembaga akademik yang telah terlatih dan berpengalaman dalam melakukan pengambilan data kesehatan kerang. Sehingga, kualitas data yang diambil dapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tim pemantauan kesehatan kerang terdiri dari CI sendiri, kemudian ada DKP Provinsi Papua Barat, DKP Kabupaten Kaimana, Dinas Pariwisata Kabupaten Kaimana, Distrik Kabupaten Kaimana, *The Nature Conservancy* (TNC Indonesia), Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC), klub selam *Faknik Diving Club* Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNIPA.

¹⁰⁰ “Monitoring Kesehatan Karang di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana Distrik Buruway, Papua Barat,” *Science for Conservation*, 25 Februari, 2023, <https://science4conservation.com/monitoring-kesehatan-karang-di-kawasan-konservasi-perairan-daerah-kaimana-distrik-buruway-papua-barat/> (diakses 4 Juni 2023).

(Herbivora/Herbivore), yaitu ikan butana (*Acanthuridae*), ikan kakatua (*Scaridae*), dan ikan baronang (*Siganidae*).¹⁰¹

Pemantauan dilakukan dengan dasar Protokol Pemantauan Terumbu Karang Untuk Menilai Kawasan Konservasi Perairan (*Coral Reef Monitoring Protocol for Assessing Marine Protected Areas in the Coral Triangle*). Protokol ini awalnya dikembangkan oleh Joanne Wilson dan Alison Green pada tahun 2009 dan kemudian dimodifikasi oleh Gabby Ahmadia di tahun 2013. Sesuai dengan panduan protokol pemantauan tersebut, pengumpulan data tutupan karang dan biomassa ikan diambil pada kedalaman 8 – 10 meter. Data tutupan karang diambil menggunakan metode *Point Intercept Transect* (PIT) dengan pengukuran sepanjang 50 meter dengan jumlah pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali. Data yang diambil yaitu bentuk pertumbuhan karang pada interval titik 0,5 meter sepanjang transek yang sudah ditentukan. Sementara data biomassa ikan dan kepadatan ikan diambil menggunakan metode yang menggabungkan antara metode *Underwater Visual Census* (UVC) dan *belt transect* sepanjang transek 50 meter, lebar 5 (lima) meter untuk ikan kecil (≤ 35 cm) dan lebar 20 meter untuk ikan besar (> 35 cm) dengan jumlah pengulangan 5 (lima) kali, serta ditambah dengan waktu yang dibutuhkan ikan untuk berenang (*timeswim*) pada kedalaman 5 (lima) meter selama 20 menit.¹⁰²

¹⁰¹ Dariani Matualage, dkk., "Penyusunan Laporan Hasil *Monitoring* Ekologi di KKPD Kaimana Distrik Buruway Tahun 2019," *Bird's Head Seascape*, April – Juni, 2019, 1, https://birdsheadseascape.com/download/indonesian%20publications/NL_Periode-II-Apr-Jun-2019_Final.pdf.

¹⁰² Gabby Ahmadia, Joanne Wilson, & Alison Green, *Protokol Pemantauan Terumbu Karang untuk Menilai Kawasan Konservasi Perairan* (Jakarta: *Coral Triangle Support Partnership*, 2013)

Selain itu, pelaksanaan pemantauan juga dilakukan dengan menggunakan kapal *Live on Board* (LOB) KLM Kurabesi Explorer Nusantara sebagai base tim pemantauan dengan didukung 3 (tiga) *speedboat* kecil untuk mobilisasi tim pemantauan yang menyebar ke 28 lokasi yang terdiri dari 15 lokasi di Zona Larang Tangkap dan 13 sites di Zona Pemanfaatan.

Setelah penghimpunan data dilakukan pada waktu dan lokasi yang ditentukan, data-data dari pemantauan tersebut dianalisis untuk melihat gambaran secara menyeluruh tentang kondisi ekologi yang meliputi kondisi tutupan karang dan biomassa ikan di wilayah KKP Buruway. Kondisi ekologi yang dianalisis adalah tutupan karang dan biomassa ikan. Hasil dari analisis yang dilakuka oleh tim pemantauan Kesehatan karang tersebut kemudian disusun dalam 1 (satu) dokumen Laporan Status dan Tren Ekologi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Buruway, Kaimana Tahun 2019. Dalam hasil pemantauan secara umum menemukan bahwa kondisi terumbu karang berada dalam keadaan yang relatif sedang hingga buruk. Tim pemantauan menemukan adanya bekas bom yang masih baru di lokasi Reef Kerang dan Reef Panjang dan banyak ditemukan patahan karang lama yang sudah mulai ditumbuhi oleh alga. Pada beberapa lokasi penyelaman lainnya ditemukan juga adanya *Hydroid* dan dominasi patahan karang yang ditemukan di hampir seluruh lokasi. Hal ini menyebabkan buruknya kualitas jarak pandang yang hanya dapat dijangkau sejauh 3 (tiga) hingga 5 (lima) meter saja. Sementara pada

diakses 8 Juni 2023,

https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZDcwZDc0YjVmOGM2YjgzYtQzMTViYWWE0MzExZGE3YjI1YTBmNWM3NQ==.pdf.

kondisi biomassa ikan pada banyak lokasi cenderung rendah, baik dari tipe maupun kuantitasnya apabila ditinjau dengan KKP lain di BLKB. Di sejumlah lokasi pemantauan misalnya Reef Keramat, Reef Taruri 2, Buka Karu, dan Niney mempunyai kuantitas ikan yang cenderung lebih melimpah jika dibanding lokasi lain. Ditemukannya tipe dan kuantitas ikan yang sedikit ketika dilakukannya aktivitas pemantauan membuat tim pemantauan yakin bahwa menangkap ikan terlalu banyak dan kadang memanfaatkan alat yang merusak lingkungan, misalnya bom dan busur yang dilakukan oleh nelayan masih sering terjadi.¹⁰³

Berdasarkan laporan hasil pemantauan ini kemudian dapat diketahui penyebab dan gejala yang terjadi pada kerusakan terumbu karang. Sehingga, lebih mudah bagi CI untuk mengambil tindakan dalam kegiatan konservasi sesuai dengan penyebab dan gejala yang ada. Hasil laporan ini juga dimanfaatkan oleh CI untuk menyusun pelaporan teknis untuk kebutuhan dokumentasi, diseminasi, dan komunikasi secara lebih luas, baik bagi donatur, mitra kerja sama, ataupun masyarakat secara umum yang terlibat sehingga bisa mengembangkan kesadaran dan kontribusinya dalam mengelola kawasan konservasi. Selain itu, CI juga dapat menggunakan laporan ini sebagai dasar rekomendasi untuk mengelola kawasan konservasi selaku hal yang dipertimbangkan dalam

¹⁰³ “Monitoring Kesehatan Karang di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana Distrik Buruway, Papua Barat,” *Science for Conservation*, 25 Februari, 2023, <https://science4conservation.com/monitoring-kesehatan-karang-di-kawasan-konservasi-perairan-daerah-kaimana-distrik-buruway-papua-barat/> (diakses 4 Juni 2023).

menetapkan ketentuan manajemen KKP Daerah Buruway. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan laporan ini di antaranya sebagai berikut.

1. Mengaktifkan kembali kegiatan patroli pengawasan sehingga dapat mengelola dan memastikan aktifitas manusia baik nelayan maupun wisatawan tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan terumbu karang dan perikanan di KKPD Buruway.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kawasan Konservasi Perairan dan keuntungannya untuk mendukung perikanan dan keberlangsungan sumberdaya di Buruway.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah, baik sampah rumah tangga berbentuk padat maupun cairan yang dapat mengakibatkan pencemaran.
4. Bekerja sama dengan mitra lain seperti peneliti atau mahasiswa untuk melakukan penelitian yang dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan KKPD Buruway.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Purwanto, dkk., Laporan Status dan Tren Ekologi KKPD Buruway, Kaimana Universitas Papua, *The Nature Conservancy, Conservation International*, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Manokwari, Sorong, Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Pada bab penutup, peneliti menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

A. Kesimpulan

CI hadir di Papua Barat untuk mengerjakan konservasi lingkungan menggunakan 4 (empat) strategi. *Pertama*, strategi *integrate* di mana CI mendukung integrasi antara pembangunan dan konservasi melalui pembentukan Perdasus tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat. CI juga mendukung integrasi pembangunan dan konservasi dengan mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

Kedua, strategi *retain options* melalui kerja sama CI dengan Balai KKPKN Kupang. Kerja sama ini terikat oleh Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan *Conservation International Foundation* tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Dalam dokumen perjanjian ini dimuat Rencana Kerja Kemitraan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama periode kerja sama berlangsung.

Ketiga, pada strategi *mix cure and prevention*, CI menggunakan pendekatan *community based* dengan membuat *capacity building* kepada masyarakat. CI merekrut masyarakat sebagai staf untuk membuat pelatihan serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Dan yang *keempat*, strategi *focus on causes as well as symptoms* dilakukan CI melalui pemantauan kesehatan terumbu karang di KKP Distrik Buruway.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti kepada pihak-pihak berikut.

1. Conservation International

Bekerja di wilayah yang masih memegang teguh warisan budaya dan adat istiadat, CI diharapkan dapat membangun komunikasi lebih baik lagi dengan masyarakat lokal. CI juga harus benar-benar mempelajari peraturan-peraturan dan hukum adat. Hal ini dapat meminimalisir kesalahpahaman yang dapat terjadi antarpihak. Sehingga, hubungan kerja sama yang terjalin dengan masyarakat lokal bisa lebih kuat lagi. Selain itu, CI juga harus memperkuat pemantauan di kawasan konservasi perairan karena masih ditemukannya 1 (satu) atau 2 (dua) kasus penangkapan ikan dengan alat tangkap yang merusak lingkungan.

2. Pemerintah Daerah

Dalam menghadapi permasalahan yang muncul akibat pembangunan, pemerintah diharapkan dapat memperkuat landasan hukum yang mengatur jalannya pembangunan. Pemerintah juga harus melakukan

pemantauan yang kuat supaya implementasi dari peraturan-peraturan yang ada tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat lokal, sehingga pembangunan tidak hanya pada pembangunan daerah saja. Tetapi, kondisi sosial masyarakatnya juga harus berkembang, misalnya pada pembangunan ekonomi masyarakat lokal.

3. Masyarakat Lokal

Kesadaran masyarakat lokal untuk melestarikan alam harus dikuatkan. Peralihan pelestarian juga dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat jika dikembangkan dengan baik. Masyarakat lokal harus memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.

4. Akademisi

Terdapat banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Hal ini lantaran beberapa kendala yang dirasakan oleh peneliti, seperti keterbatasan data yang ada dalam internet serta kendala lainnya dari sisi waktu dan biaya pada saat proses penelitian. Oleh karena itu, penelitian dengan topik sejenis diharapkan dapat dilakukan kembali dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam konservasi lingkungan di Papua Barat. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan sumber data dan informasi yang lebih kaya. Sehingga, penjelasan penelitian selanjutnya dapat lebih terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus.

Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan *Conservation International Foundation* tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49), Ps. 1(9).

Buku

Ahmadia, Gaby, Joanne Wilson, & Alison Green. *Protokol Pemantauan Terumbu Karang untuk Menilai Kawasan Konservasi Perairan*. Jakarta: Coral Triangle Support Partnership, 2013. Diakses 8 Juni 2023. https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZDcwZDc0YjVmOGM2YjgzYTQzMTViYWWE0MzExZGE3YjI1YTBmNWM3NQ==.pdf.

- Provinsi Papua Barat.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 09* (03) (2021). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/36386>.
- Aini, Nur, Arif Satria, & Ekawati Sri Wahyuni. “Mekanisme Akses dan Kekuasaan dalam Memperkuat Kinerja Institusi Pengelolaan Ekowisata Bahari (Studi Kasus: Kampung Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat).” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* (2019): 65-77.
- Cámara-Leret, Rodrigo, dkk. “New Guinea has the world’s richest island flora.” *Nature* 584 (2020): 579–583. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2549-5>.
- Chairunnisa, Eca. “Peranan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa di Indonesia.” *Global Political Studies Journal Vol. 2 No 1* (April 2018). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2012/1355>.
- Deda, Andreas Jefri, dan Suriel Samuel Mofu. “Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai Orang Asli Papua Ditinjau dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian.” *Jurnal Administrasi Publik Volume 11 Nomor 2* (Oktober 2015): 15.
- Irawan, Mochamad, dkk. “A Time for Locally Driven Deveopment in Papua and West Papua.” *Development in Practice Volume 29 – Issue 6* (2019): 817-823. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09614524.2019.1609907>.

- Kurnianda, Retitha. "Peran (CIF) *Conservation International Foundation* dalam Konservasi Wilayah Laut Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2017." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.9, No. 2 (2021): 378-394.
- Oktavia, Putu. "Evolusi dan Tantangan *Governance* untuk *Common Property Resource*." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS*, Volume 1, No. 1 (Februari 2018): 35.
- Rakhman, Moh. Arief & Haryadi. "Dinamika Peran NGO Lingkungan Hidup dalam Arena Politik Lokal di Provinsi Jambi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 4. No. 4 (November 2020): 188.
- Setyabudi, Agung. "Model Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam (Studi Kasus di Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat)." *Jurnal Good Governance* Volume 17 No. 2 (2021): 137-153.
<https://doi.org/10.32834/gg.v17i2.337>.
- Setyawan, Edy, dkk. "A Holistic Approach to Manta Ray Conservation in the Papuan Bird's Head Seascape: Resounding Success, Ongoing Challenges." *Marine Policy* Volume 137 (Maret 2022): 104953.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104953>.
- Theodorus, Timothy Febrian, Aswin Baharuddin, & Bama Andika Putra. "Peran *Conservation International* (CI) terhadap Konservasi Perairan di Bali (Studi Kasus: Desa Tulamben, Bali)." *Hasanuddin Journal of International Affairs* Volume 1, No 2 (Agustus 2021): 155.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. “Ekowisata,” Diakses 29 Mei 2023.

<https://dlh.blitarkab.go.id/ekowisata/>.

Forest History Society. “Gifford Pinchot (1865-1946) — 4th Chief of the Division of Forestry, 1898-1905 & 1st Chief of the Forest Service, 1905-1910.”

Diakses 27 September 2022. <https://foresthistor.org/research-explore/us-forest-service-history/people/chiefs/gifford-pinchot-1865-1946/>.

Green Climate Fund. “*Conservation International Foundation*.” Diakses 19 September 2022. <https://www.greenclimate.fund/ae/ci>.

Indonesian Ocean Pride. “Papua Barat Menjadi Propinsi Konservasi Pertama di Dunia!” Diakses 4 Oktober 2022.

<https://indonesianoceanpride.org/id/berita/west-papua-becomes-worlds-first-conservation-province/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Konservasi.” Diakses 22 September 2022. <https://kbbi.web.id/konservasi>.

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia. “Laporan tentang Deforestasi di Tanah Papua pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan.” Diakses 27 September 2022.

<https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1613443973.pdf>.

Kementerian Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat. “Infrastruktur Papua dan Papua Barat Terus Dibangun Kementerian PUPR, Dari Jalan Hingga Pemukiman.” Diakses 11 Januari 2023.

<https://www.pu.go.id/berita/infrastruktur-papua-dan-papua-barat-terus-dibangun-kementerian-pupr-dari-jalan-hingga-pemukiman>.

Konservasi Indonesia. “Lokasi Kerja Kami Sahul Papua.” Diakses 8 Juni 2023.

<https://www.konservasi-id.org/lokasi-kerja-2/sahul-papua>.

Konservasi Indonesia. “Lokasi Kerja Kami Sunda Banda.” Diakses 8 Juni 2023.

<https://www.konservasi-id.org/lokasi-kerja-2/sunda-banda>.

Konservasi Indonesia. “Lokasi Kerja Kami Sundaland.” Diakses 8 Juni 2023.

<https://www.konservasi-id.org/lokasi-kerja-2/sundaland>.

Konservasi Indonesia. “Sejarah Kami.” Diakses pada 31 Januari 2023.

<https://www.konservasi-id.org/sejarah-kami>.

Maulida, Safina. “Merayakan Hak Asasi Manusia, Mendesak Perlindungan dan Penghormatan Hak Buruh Migran.” *Migrant CARE*. Diakses 26 September 2022.

<https://migrantcare.net/2019/11/merayakan-hak-asasi-manusia-mendesak-perlindungan-dan-penghormatan-hak-buruh-migran/>.

Patty, Rivaldo D. “Mengenal Konservasi.” *Balai Besar Konservasi Sumber Daya*

Alam Papua Barat. Diakses 22 September 2022. <https://bbksda-papuabarat.com/mengenal-konservasi/>.

Pemerintah Provinsi Papua. “Potensi Daerah,” Diakses 13 April 2023.

<https://www.papua.go.id/view-detail-page-263/undefined>.

Srinivas, Hari. “Roles of NGOs.” *Global Development Research Center (GDRC)*.

Diakses pada 26 September 2022. <https://www.gdrc.org/ngo/ngo-roles.html>.

Subbagian Hukum BPK Provinsi Papua Barat. “Perdatus Pembangunan

Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua.” *Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat*. Diakses 19 Mei 2023.

https://papuabarat.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Perdatus-SDGs-utk-Kesejahteraan-Masy-Papua_NET-CATBER.pdf.

Union of International Association. “*What is international non-governmental organization (INGO)?*” Diakses 25 September 2022.

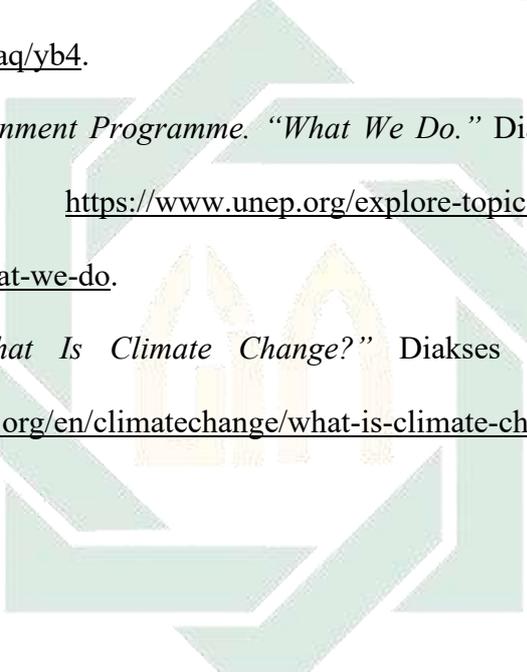
<https://uia.org/faq/yb4>.

United Nations Environment Programme. “*What We Do.*” Diakses 13 Februari 2022.

<https://www.unep.org/explore-topics/ecosystems-and-biodiversity/what-we-do>.

United Nations. “*What Is Climate Change?*” Diakses 9 Januari 2023.

<https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A